

**MANAJEMEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2016 OLEH DINAS SOSIAL
KOTA SERANG (Studi Kasus Kecamatan Kasemen)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik



oleh :

Yuli Eka Putri/6661141330

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuli Eka Putri

NIM : 6661141330

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 Juli 1996

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2016 Oleh Dinas Sosial Kota Serang (Studi Kasus Kecamatan Kasemen)” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juni 2018



Yuli Eka Putri

NIM. 6661141330

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : YULI EKA PUTRI
NIM : 6661141330
Judul Skripsi : MANAJEMEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) TAHUN 2016 DI KOTA
SERANG (Studi Kasus Kecamatan Kasemen Kota Serang)

Serang, 7 Juni 2018

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Titi Stiawati, M.Si
NIP. 197011252005012001



Yeni Widvastuti, M.Si
NIP.197602102005012003

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Sjafari., M.Si
NIP.197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

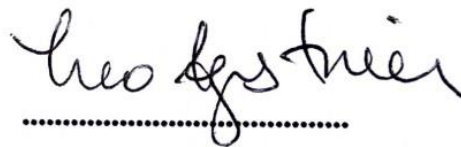
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Yuli Eka Putri
NIM : 6661141330
Judul Skripsi : MANAJEMEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) TAHUN 2016 OLEH
DINAS SOSIAL KOTA SERAANG (Studi Kasus Kecamatan
Kasemen)

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 7
Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Juni 2018

Ketua Penguji
Leo Agustino., Ph.D
NIP. 197408032003121001



.....

Anggota :
Drs. Hasuri Waseh., M.Si
NIP.196202032000121002



.....

Anggota :
Yeni Widvastuti., M.Si
NIP. 197602102005012003



.....

Mengetahui,



Dekan Fisip
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dr. Agus Sjaafari., M.Si
NIP. 1974050106011005



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik
Listyaningsih., S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001

“Beri nilai dari usahanya bukan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan”. – Albert Einstein

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”

(Albert Einstein)

“Meski Sudah lulus, penelitian hidup masih akan terus berjalan karena skripsi itu kehidupan, dan hidup penuh dengan penelitian”.

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Kedua orang tua ku terkasih dan tercinta

Ayahanda Zolfirmasyah dan Ibunda Eni Suhaeni

Serta Adik-adik dan Kekasihku tercinta

ABSTRAK

Yuli Eka Putri. NIM. 6661141330. 2018. Skripsi. MANAJEMEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2016 OLEH DINAS SOSIAL KOTA SERANG (Studi Kasus Kecamatan Kasemen). Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Titi Stiawati, M.Si dan Pembimbing II: Yeni Widyastuti, M.Si.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan perbaikan rumah sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahannya yaitu terjadi ketidakpastian waktu pencairan dana dan jadwal pelaksanaan program RS-RTLH, kurangnya transparansi dalam pemberian bantuan kepada penerima, terkendalanya surat kepemilikan atau akta tanah, dan lemahnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick menurut Handoko (2003:11) yang meliputi: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*, dan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan program RS-RTLH ini belum optimal karena peran Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW serta tokoh masyarakat terbilang tidak aktif sehingga membebani TKSK, Dinas Sosial, serta warga itu sendiri. Pembinaan yang dilakukanpun dapat dikatakan belum efektif. Anggaran yang tidak mencukupi membuat masyarakat meminjam dana kepihak lain untuk menutupinya. Oleh karenanya, rekomendasi penelitian yang diberikan adalah mengubah pola pikir dan menekankan pemahaman masyarakat penerima bantuan terkait tujuan program, bahwa bantuan hanyalah untuk merehab rumah, bukan untuk renovasi; mengkaji ulang penyampaian bimbingan teknisnya dengan cara mematangkan kembali konsep, tujuan serta tata cara penyampaiannya, serta mengintensifkan dan optimalisasi dalam hal pemberian sosialisasi; dilakukan *spot check* oleh Dinas Sosial untuk mencocokkan dan mengkonfirmasi kepada masyarakat dan pihak ketiga.

Kata Kunci : Manajemen, Rehabilitasi Sosial, Rumah Tidak Layak Huni

ABSTRACT

Yuli Eka Putri. NIM. 6661141330. 2018. Thesis. MANAGEMENT OF SOCIAL REHABILITATION PROGRAM OF UNINHABITABLE HOUSE (RS-RTLH) 2016 BY SOCIAL SERVICES OF KOTA SERANG (Case Study of Kecamatan Kasemen). Public Administration Departement. Faculty of Social Politics. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Titi Stiawati, M.Si and Advisor II: Yeni Widyastuti, M.Si.

Social rehabilitation program of uninhabitable house is one of the ways to overcome the poverty. Through the rehabilitation house program, it is expected for the poor people to improve their social function. However, there are some problems occur in its implementation like an uncertainty of funds withdrawal time and program schedules, less transparent information about the aid distribution, constrained to has a land deed, and poor coordination between the related parties. To analyze this problems, the researcher used Luther Gullick's management function theory (in handoko, 2003:11) which covered Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting, and qualitative descriptive as the research method. The result of this research showed that RS-RTLH program was not working optimally because the district, sub-district, and community leaders are less active to support the program and caused the TKSK, the Social Services, and the aid recipients burdened. The technical guidance from the related parties was not really effective and the insufficient funds caused the recipients made a loan. Therefore, it is recommended to change the recipients' mindset and improve their understanding about the program's purpose; improve the concept, purpose, and the way of delivering the technical guidance, and optimizing the socialization; do the spot check on the recipients and the third parties by social services to check and confirm if the program works properly.

Keywords : Management, Social Rehabilitation, Uninhabitable House

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi kemudian shalawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah mengiringi doa dan harapan penulis untuk mewujudkan terselesaikannya penelitian skripsi ini yang berjudul **MANAJEMEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2016 OLEH DINAS SOSIAL KOTA SERANG (Studi Kasus Kecamatan Kasemen Kota Serang)**. Penelitian skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada konsentrasi Manajemen Publik program studi Ilmu Administrasi Publik. Sekalipun penulis menemukan hambatan dan kesulitan dalam memperoleh informasi akurasi data dari para narasumber namun disisi lain penulis juga sangat bersyukur karena banyak mendapat masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang yang sedang diteliti oleh penulis. Untuk terwujudnya penulisan penelitian skripsi ini banyak pihak yang membantu penulis dalam memberikan motivasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Zolfirmansyah yang selalu menjadi inspirasi dalam hidup dan Ibunda Suhaeni, yang senantiasa memotivasi, mendoakan, mendidik, membantu baik materil maupun non-materil dengan keringat yang senantiasa menetes dari mereka yang bisa mengantarkan penulis

sampai sejauh ini dalam hidup dan tidak lupa kepada Adik Rizky Nugraha dan Farel Feriansyah yang senantiasa menjadi penyemangat dalam hidup penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Dr. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ibu Dr. Arenawati, M.Si., Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8. Ibu Titi Stiawati, M.Si., sebagai dosen pembimbing I dan juga yang peneliti anggap sebagai ibu di perkuliahan, beliau telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Ibu Yeni Widyastuti, M.Si., sebagai dosen pembimbing II yang telah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan secara sabar dan juga dukungan selama proses penyusunan skripsi.
10. Bapak Dr. Abdul Apip, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan, serta memotivasi sejak awal masuk ke dunia perkuliahan.
11. Bapak Leo Agustino, Ph.D., selaku ketua penguji skripsi yang telah banyak membantu membimbing, mengarahkan, serta memotivasi dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
12. Bapak Drs. Hasuri Waseh, M.Si., selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak membantu membimbing, mengarahkan, serta memotivasi dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
13. Kepada seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membekali ilmu selama perkuliahan dan membantu dalam memberikan informasi selama proses perkuliahan.
14. Pihak Dinas Sosial Kota Serang yang telah memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data penulis;

15. Pihak Kecamatan, Kelurahan, RT/RW serta masyarakat wilayah Kasemen yang telah memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data penulis;
16. Kepada Wildan Firdaus S.A.P yang penulis sangat sayangi dan cintai setelah kedua orangtua penulis, terimakasih selalu setia menemani dan membantu penulis dalam keadaan sulit sekalipun dan selalu menjadi penyemangat serta motivator untuk menyelesaikan penelitian ini.
17. Kepada mentorku Asep Saripudin, S.A.P dan Heri Suwandi, S.Pd yang selama ini memberikan arahan, bimbingan, semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada para sahabatku yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat, doa dan dukungan yaitu Nuranisa, Siti Nafilah, Zetha Bernynda S.A.P, Widyo Rieska Utama S.A.P, Nuroktafiani, Slaras Kuniwa, Dini Nurul Fajri, Syarah Viena Citamembara Sukma Prayoga.
19. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2014, khususnya kelas B Administrasi Publik yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan selalu ada disaat duka selama menjalani perkuliahan.
20. Kepada kawan-kawan KKM Tematik kelompok 80, yang telah memberikan semangat dan pengalaman hidup kepada penulis..
21. Kepada keluarga besarku tercinta Mommy Nancy, Nenek H. Sukanti, Tante Yayat, Om Afif, Tante Tunah, Tante Itoh, Om Asep, Tante Mumun, Uwa Nuraini, Kakak Alfirano, Ayu Dina, Ayu Ria, Kakak Adi, Kakak Rudi serta saudara-saudara yang telah memberikan

semangat dan dukungan baik materiil maupun non-materiil kepada penulis.

22. Serta semua pihak yang terlibat membantu penulis untuk memberikan arahan, bimbingan, semangat, dan doa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tak luput dari kesempurnaan yang tentunya memiliki keterbatasan yang terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Penulis mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran dari pembaca yang dapat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Serang, Juni 2018

Penulis

Yuli Eka Putri

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Lembar Pernyataan Orisinalitas	
Lembar Persetujuan	
Lembar Persembahan	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Istilah	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	25
1.3 Batasan Masalah	26
1.4 Rumusan Masalah	27
1.5 Tujuan Penelitian	27
1.6 Manfaat Penelitian	27
1.7 Sistematika Penulisan	28

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori	33
2.1.1 Definisi Manajemen	33
2.1.2 Asas-Asas Manajemen	37
2.1.3 Fungsi Manajemen	38
2.1.4 Filasafat Manajemen	54
2.1.5 Tujuan Manajemen	55
2.1.6 Definisi Rehabilitasi Sosial	56
2.1.7 Definisi Rumah Tidak Layak Huni	56
2.1.8 Definisi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	57
2.2 Penelitian Terdahulu	62
2.3 Kerangka Berfikir	68
2.4 Asumsi Dasar	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	71
3.2 Fokus Penelitian	72
3.3 Lokus Penelitian	72
3.4 Instrumen Penelitian	73
3.5 Informan Penelitian	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data	75
3.7 Teknik Analisis Data	77
3.8 Triangulasi	80

3.8 Jadwal Penelitian	80
-----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	82
4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang	82
4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Serang	84
4.1.1.1 Keadaan Penduduk Kota Serang.....	84
4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Serang	87
4.1.2.1 Kedudukan Dinas Sosial Kota Serang.....	87
4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang.....	87
4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Serang	88
4.1.2.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Serang.....	88
4.1.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan.....	89
4.1.2.6 Program Prioritas Organisasi Perangkat Daerah.....	90
4.2 Deskripsi Data	93
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	93
4.2.2 Data Informan Peneliti	95
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	97
4.3.1 <i>Planning</i> (Perencanaan)	98
4.3.2 <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	107
4.3.3 <i>Staffing</i> (Penyusunan Pegawai)	109
4.3.4 <i>Directing</i> (Pembinaan Kerja)	112
4.3.5 <i>Coordinating</i> (Pengkoordinasian)	115
4.3.6 <i>Reporting</i> (Pelaporan)	117
4.3.7 <i>Budgeting</i> (Penggangan)	120
4.4 Pembahasan	127
1. <i>Planning</i> (Perencanaan)	127

2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	131
3. <i>Staffing</i> (Penyusunan Pegawai)	133
4. <i>Directing</i> (Pembinaan Kerja)	134
5. <i>Coordinating</i> (Pengkoordinasian)	135
6. <i>Reporting</i> (Pelaporan)	136
7. <i>Budgeting</i> (PENGANGGARAN)	137

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	141
5.2 Saran	142

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Distribusi Presentase Penduduk Miskin Banten, Maret 2016	7
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	69
Gambar 3.1 Analisis Data	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	5
Tabel 1.2 Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	5
Tabel 1.3 Indikator Kependudukan Banten dan Nasional.....	6
Tabel 1.4 Statistik Kemiskinan Banten.....	7
Tabel 1.5 Statistik Perumahan di Provinsi Banten (dalam persen).....	11
Tabel 1.6 Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin (RTM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016.....	13
Tabel 1.7 Rekapitulasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.....	14
Tabel 1.8 Realisasi Rumah Tidak layak Huni Kota Serang 2011-2016	15
Tabel 1.9 Sumber Anggaran Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang 2015-2016.....	16
Tabel 1.10 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 di Kota Serang.....	21
Tabel 2.1 Fungsi-Fungasi Manajemen Menurut Para Ahli	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian	74
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	76

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	81
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan.....	83
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2013.....	85
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2013.....	86
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	86
Tabel 4.5 Data Informan Peneliti.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Informan
- Lampiran 4 : *Membercheck*
- Lampiran 5 : Matriks Wawancara
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Nomor 800/Kep. 025 / Dinsos /VII/2016 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kota Serang Tahun 2016
- Lampiran 7 : Lampiran Keputusan Walikota Kota Serang Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Serang Tahun 2016
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

BPS	: Badan Pusat Statistik
KK	: Kartu Keluarga
RS-RTLH	: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
RTM	: Rumah Tangga Miskin
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PKH	: Program Keluarga Harapan
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
PSM	: Pengembangan Sosial Masyarakat
UGB	: Undian Gratis Berhadiah
PUB	: Pengumpulan Uang dan Barang
WKBSM	: Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KSB	: Kampung Siaga Bencana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tugas pemerintah dalam pembangunan nasional secara umum yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Implementasi dari meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya melalui program pembangunan secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pada dasarnya pelaksanaan program pembangunan senantiasa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada wilayah tersebut dalam seluruh proses dan aktivitas program pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat memberikan hasil mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan dengan baik memerlukan penanganan yang serius dan tidak dapat dilakukan secara instan.

Pembangunan berkelanjutan dari segala sektor seperti sosial, ekonomi, dan budaya seharusnya bisa menjadi sebuah implementasi nyata dan juga menjadi sebuah alat pemersatu bangsa. Indonesia perlu melakukan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya serta membuat masyarakat merasa sejahtera sehingga berpengaruh pada perkembangan negara. Maka dari itu negara harus bisa menjadi penyokong dan fasilitator untuk masyarakat untuk hidup dengan layak dan nyaman.

Istilah pembangunan identik dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industrialisasi, karena pembangunan pada umumnya dimaknai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan dan memperbaiki kondisi pemukiman serta kesehatan. Pembangunan sering juga diasosiasikan dengan perubahan atau kemajuan pada sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional selama ini ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas yang ditandai oleh tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Masih terdapat masalah ketimpangan yang tercermin dari indeks gini ratio, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan indeks ketimpangan di Indonesia yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2016 turun menjadi 0,397. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan gini ratio September 2015 yang sebesar 0,402 (BPS. 2016. <http://www.neraca.co.id/article/73521/indeks-keparahan-kemiskinan-meningkat-jokowi-ketimpangan-harus-dihentikan>. 19 November 2017). Namun hal ini masih belum mengindikasikan perbaikan yang berarti dalam mengatasi masalah ketimpangan dan keadilan.

Kondisi yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau berada dalam garis kemiskinan. Masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia atau 10,86 persen dari total penduduk Indonesia, berkurang

sebesar 0,50 juta orang dibandingkan kondisi September 2015 sebesar 28,51 juta orang atau 11,13 persen (BPS. 2016. <https://www.bps.go.id/brs/view/1229>, 19 November 2017).

Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Pada pembangunan ekonomi sangat diperlukan bagi pembangunan sosial. Namun demikian, hubungan antara keduanya tidak selalu bersifat otomatis. Pembangunan ekonomi baru bermakna jika dialokasikan dengan baik bagi kepentingan pembangunan kesejahteraan sosial. Berbagai studi telah cukup meyakinkan bahwa secara teoritis maupun empiris, keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tingkat standar hidup yang baik sangat ditentukan oleh strategi pembangunan di negara yang memadukan pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penulis mengemukakan bahwa orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti oleh pembangunan sosial, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Kemiskinan menjadi salah satu tema pokok yang kompleks dalam pembangunan, dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap perekonomian, kondisi pemukiman, lingkungan dan lain sebagainya. Mengacu kepada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata

pencapaian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakpahaman ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara martabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, perumahan ataupun rasa aman dan hak untuk partisipasi dalam kehidupan sosial politik bagi penduduk.

Salah satu Provinsi yang sebagian masyarakatnya masih berada dalam garis kemiskinan dan juga sedang gencar melakukan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya adalah Provinsi Banten. Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000, status Keresidenan Banten Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Pada awalnya Provinsi Banten terdiri 4 (empat) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan 2 (dua) Kota, yaitu : Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran untuk Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya Kabupaten Tangerang terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota.

**Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2016-Juni 2017**

Kabupaten/Kota	Kecamatan		Desa		Kelurahan	
	2016	Juni 2017	2016	Juni 2017	2016	Juni 2017
Kabupaten :						
Kab. Pandeglang	35	35	326	326	13	13
Kab. Lebak	28	28	340	340	5	5
Kab. Tangerang	29	29	246	246	28	28
Kab. Serang	29	29	320	320	-	-
Kota :						
Kota Tangerang	13	13	-	-	104	104
Kota Cilegon	8	8	-	-	43	43
Kota Serang	6	6	30	30	36	36
Kota Tangsel	7	7	5	5	49	49
Provinsi Banten	155	155	1 267	1 267	278	278

Sumber : BPS Provinsi Banten

Tabel 1.2 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi Banten
Kabupaten :		
Kab. Pandeglang	2.746,89	28,43
Kab. Lebak	3.426,56	35,46
Kab. Tangerang	1.011,86	10,47
Kab. Serang	1.734,28	17,95
Kota :		
Kota Tangerang	153,93	1,59
Kota Cilegon	175,50	1,82
Kota Serang	266,71	2,76
Kota Tangsel	147,19	1,52
Provinsi Banten	9 662,92	100,00

Sumber : Banten Dalam Angka 2017

Provinsi Banten merupakan salah satu dari lima wilayah terkecil di Indonesia (9.662,92 km²) yang pada tahun 2016 mempunyai penduduk sebanyak 12,20 juta jiwa (peringkat ke-5 di tingkat nasional) atau 4,72 persen dari total seluruh penduduk Indonesia, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.263 jiwa/ km² pada tahun 2016 (peringkat ke-3 di tingkat nasional).

Tabel 1.3 Indikator Kependudukan Banten dan Nasional

Uraian	Juni 2010	Juni 2017
BANTEN		
Penduduk (juta orang)	10,6	12,4
- Laki-laki	5,4	6,3
- Perempuan	5,2	6,1
Rasio Jenis Kelamin	104,7	103,9
Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,78	2,20
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	1 100	1 288
INDONESIA		
Penduduk (juta orang)	237,6	261,9
- Laki-laki	119,6	131,6
- Perempuan	118,0	130,3
Rasio Jenis Kelamin	101,4	101,0
Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,49	1,34
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	124	137

Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)

Hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten pada Juni 2017 sudah mencapai 12,4 juta orang. Penduduk laki-laki berjumlah 6,3 juta orang, lebih banyak dari penduduk perempuan yang hanya 6,1 juta orang. Dengan demikian, rasio jenis kelaminnya menjadi sebesar 103,9, atau terdapat 104 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan kondisi tujuh tahun sebelumnya, penduduk Banten tumbuh pesat hingga mencapai 2,20 persen per tahun. Selain itu, juga lebih pesat dari Indonesia yang rata-rata hanya tumbuh 1,34 persen per tahun. Akibatnya, proporsi penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 4,5 persen menjadi 4,8 persen. Oleh karena itu, Banten berhasil mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia. Dibandingkan dengan luas wilayahnya yang hanya sekitar 10 ribu kilometer persegi, Banten

pada tahun 2017 terasa lebih sesak. Kondisi Ini terlihat jelas dari tingkat kepadatan penduduknya yang naik hingga menjadi 1.288 orang per km². Selain itu, Banten juga menjadi provinsi ketiga terpadat se-Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa semakin padat suatu wilayah maka akan semakin kompleks permasalahan sosial di dalam lingkungan masyarakatnya.

Presentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2016 sebesar 5,36 persen, artinya permasalahan sosial yang ada di Provinsi Banten cukup banyak didominasi oleh kemiskinan yang biasa disebut sebagai kunci utama dalam mata rantai permasalahan sosial.

Tabel 1.4 Statistik Kemiskinan Banten

Uraian	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2017
Garis kemiskinan (rupiah)	336.483	367.949	386.753
Jumlah penduduk miskin (ribuan orang)	702,4	658,1	675,0
Persentase penduduk miskin (P0)	5,90	5,42	5,45
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,935	0,797	0,859
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,229	0,171	0,190

Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 1.1 Distribusi Persentase Penduduk Miskin Banten, Maret 2016



Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)

Program pengentasan kemiskinan di Banten selama setahun terakhir ini, dapat dikatakan belum berhasil. Penilaian tersebut didasarkan kepada jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, seiring dengan naiknya garis kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin sendiri pada Maret 2017 masing-masing mencapai 675 ribu orang dan 5,45 persen, sedangkan garis kemiskinannya sekitar 389 ribu rupiah per kapita sebulan.

Dari gambaran data di atas, jumlah angka kemiskinan di Provinsi Banten relatif tinggi. Hal ini ditengarai oleh minimnya lapangan pekerjaan di Provinsi Banten yang hanya terpusat pada beberapa kota saja. Faktor lainnya juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang minim, sebagai Provinsi yang terbilang sudah cukup lama berdiri, Provinsi Banten terbilang masih kekurangan sumberdaya manusia yang banyak dan tentunya berkualitas sehingga cukup sulit untuk Banten dalam menangani masalah kemiskinan.

Selain karena jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga semakin membesar. Artinya, pengeluaran penduduk miskin Banten secara rata-rata memang meningkat, namun peningkatannya masih di bawah kenaikan garis kemiskinan. Imbasnya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin, semakin melebar. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan ke depannya akan lebih sulit untuk dilakukan, karena pemerintah harus menyusun program intervensi yang lebih tersebar dan dengan biaya yang lebih mahal.

Belum berhasilnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan, disebabkan karena programnya masih bersifat parsial dan urban sentris. Akibatnya, insiden kemiskinan masih belum mampu ditangani secara merata di Provinsi Banten. Oleh karena itu, Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dibutuhkan program yang terintegrasi dan lintas sektor, termasuk dengan melibatkan secara penuh berbagai pemangku kepentingan dalam program tersebut.

Kemiskinan yang ada di masyarakat berdampak pada pola kehidupan yang ada di masyarakat itu. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terepenuhinya kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan.

Di lingkungan masyarakat yang miskin, pola hidup mereka terkesan tidak teratur, berantakan, dan tidak mengutamakan kebersihan dan kerapihan seperti tinggal di tempat tidak yang layak contohnya di gubug-gubug liar pinggiran kota ataupun kolong-kolong jembatan. Untuk masyarakat miskin mereka lebih mengutamakan cara untuk bisa mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. Bagi mereka, rumah hanya digunakan sebagai tempat istirahat tanpa melihat kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, dan bagaimana kondisi rumah tersebut. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan mereka untuk membuat hunian yang layak

karena kondisi ekonomi yang buruk. Masalah seperti ini perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui penyelenggaraan perumahan yang layak.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Rumah juga menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga serta diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi keluarga miskin. Rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Kualitas rumah yang ditempati, baik dari bentuk fisik maupun fasilitas yang tersedia, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan status sosial penghuninya. Kondisi fisik rumah yang ditempati pada tahun 2016 sendiri terlihat banyak mengalami perbaikan. Hal ini diketahui dari bertambahnya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai terluas dari marmer atau keramik dan berdinding terluas dari tembok. Hanya saja, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan atap terluas dari beton atau genteng, justru

menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Salah satu Provinsi yang sedang gencar melakukan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Kondisi pemukiman di Provinsi Banten dapat dikatakan masih belum terkelola dengan baik. Berikut adalah tabel statistik perumahan di Provinsi Banten:

Tabel 1.5 Statistik Perumahan di Provinsi Banten (dalam persen)

Uraian	2015	2016	2014
Rumah tangga menempati rumah milik sendiri	80,94	81,52	77,96
Rumah tangga menempati rumah dengan luas lantai per kapita $\leq 7,2$ m ²	11,23	9,28	11,00
Rumah tangga menempati rumah dengan lantai terluas marmer/keramik	73,78	78,23	NA
Rumah tangga menempati rumah dengan atap dari beton/genteng	79,16	79,14	83,26
Rumah tangga menempati rumah dengan dinding terluas dari tembok	84,88	87,47	84,86

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data yang ada, sekitar 82 persen rumah tangga di Banten pada tahun 2016 ini sudah menempati rumah milik sendiri. Berarti, kepemilikan rumah oleh rumah tangga sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rumah yang baru, kebanyakan justru lebih luas dari rumah lama yang dulu mereka tempati. Kondisi yang demikian itu setidaknya tercermin dari turunnya

persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal 7,2 meter persegi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, permasalahan kemiskinan yang terkait dengan rumah tidak layak huni oleh kelompok masyarakat miskin memiliki permasalahan yang kompleks. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah harus mampu bertanggung jawab melalui suatu program yang dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu penanganan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin adalah kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Salah satu Kota di Provinsi Banten yang memiliki masalah mengenai rumah tidak layak huni ini yaitu Kota Serang yang merupakan ibukota dari Provinsi Banten. Di Kota Serang terdapat banyak sekali hunian yang kumuh atau rumah-rumah tak layak huni dan oleh karena itu sebagai upaya dalam menurunkan dan menanggulangi angka kemiskinan, Kota Serang melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Menurut data oleh Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (PBDT 2015), TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), dimana jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Kota Serang pada tahun 2016 terbilang cukup tinggi dibanding kota-kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Serang sebanyak 20.942 yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin (RTM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Fakir Miskin				
		Kategori Rumah Tangga Miskin (RTM)				
		Sangat Miskin	Miskin	Rentan Miskin	Hampir Miskin	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab. Pandeglang	7,625	16,032	43,497	46,190	113,344
2	Kab. Lebak	2,990	8,535	35,958	57,763	105,246
3	Kab. Tangerang	44,702	47,663	84,735	52,349	229,449
4	Kab. Serang	4,513	10,878	23,606	30,334	69,331
5	Kota Tangerang	23,787	32,343	10,132	2,315	68,577
6	Kota Cilegon	1,294	1,492	6,140	4,956	13,882
7	Kota Serang	1,792	6,383	6,995	5,322	20,492
8	Kota Tangsel	8,276	21,048	4,565	575	34,464
Jumlah		94,979	144,374	215,628	199,804	654,785

Sumber : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (PBDT 2015), TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

Oleh karena itu Kota Serang melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai bentuk upaya menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan. Program RS-RTLH merupakan salah satu program prioritas atau bisa disebut sebagai program primadona dari Dinas Sosial Kota Serang dikarenakan hasilnya yang terlihat nyata dan mampu menjadi stimulan dalam hubungan sosial antar masyarakatnya. Berikut data Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kota Serang mengenai rumah tidak layak huni:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

No.	Kabupaten/Kota	RTLH					Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Kab. Pandeglang	31 KK	95 KK	301 KK	180 KK	239 KK	1.080 KK
2.	Kab. Serang	31 KK	71 KK	145 KK	144 KK	166 KK	677 KK
3.	Kab. Lebak	43 KK	90 KK	98 KK	156 KK	121 KK	618 KK
4.	Kab. Tangerang	20 KK	92 KK	169 KK	135 KK	165 KK	785 KK
5.	Kota Serang	41 KK	32 KK	77 KK	84 KK	75 KK	399 KK
6.	Kota Cilegon	15 KK	13 KK	5 KK	71 KK	32 KK	176 KK
7.	Kota Tangerang	19 KK	36 KK	4 KK	40 KK	20 KK	159 KK
8.	Kota Tangerang Selatan	-	16 KK	15 KK	40 KK	20 KK	111 KK
Jumlah		200 KK	445 KK	814 KK	850 KK	838 KK	4.006 KK

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten

Pada tahun 2012 jumlah RS-RTLH tertinggi terdapat di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 41 KK sedangkan terendah terdapat di Kota Cilegon yaitu 15 KK. Pada tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang sebanyak 95 KK, 301 KK, 180 KK, dan 239 KK dan terendah tahun 2013 terdapat di Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 16 KK, tahun 2014 di Kota Tangerang yaitu 4 KK, dan terakhir pada tahun 2015 dan 2016 Kota Tangerang dan Tangerang Selatan memiliki angka yang sama yaitu 40 KK dan

20 KK. Berdasarkan tahun anggaran, yang terbesar terdapat di tahun 2015 yaitu sebanyak 850 KK dan terendah di tahun 2012 yaitu 200 KK. Sedangkan Kabupaten Pandeglang menempati urutan teratas dengan jumlah 1.080 KK dan Kota Tangerang menempati urutan terbawah dengan 159 KK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Serang, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang pada tahun 2016 bisa dibilang cukup tinggi mencapai sekitar 2.476 rumah yang tersebar di setiap kecamatannya, yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.8 Realisasi Rumah Tidak layak Huni Kota Serang 2011-2016

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah RS-RTLH	3.672	3.592	3.337	3.162	2.885	2.476
Realisasi	80	255	175	277	409	224
Sisa	3.592	3.337	3.162	2.885	2.476	2.252

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang

Jumlah RS-RTLH pada tahun 2011 sebesar 3.672 unit rumah. Tahun 2012 menjadi 3.592 unit rumah. Pada tahun 2013 berkurang lagi menjadi 3.337 unit rumah. Kemudian pada tahun 2014 berkurang cukup banyak menjadi 3.162 unit rumah. Pada tahun 2015 merupakan yang paling signifikan diantara tahun-tahun sebelum dan sesudahnya jumlahnya menjadi 2.885 unit rumah. Lalu pada tahun 2016 berkurang lagi menjadi 2.476 unit rumah.

Anggaran dana program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Dinas

Sosial Provinsi Banten dan untuk APBD Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang. Pada tahun 2015 dan tahun 2016, anggaran untuk program RS-RTLH di Kota Serang berasal dari APBN, APBD Provinsi Banten dan APBD Kota Serang.

Tabel 1.9 Sumber Anggaran Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang 2015-2016

No.	Sumber Anggaran	Tahun		Total (unit)
		2015 (unit)	2016 (unit)	
1.	APBN	50	50	100
2.	APBD Provinsi Banten	103	80	183
3.	APBD Kota Serang	100	100	200
Total		253	230	483

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2016

Berdasarkan keterangan tabel di atas, sumber anggaran program RS-RTLH di Kota Serang yang berasal dari APBN pada tahun 2015 berjumlah 50 unit dan pada tahun 2016 berjumlah 50 unit sehingga total keseluruhan anggaran yang bersumber dari APBN adalah 100 unit. Berbeda dengan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Banten yang setiap tahunnya selalu menyumbang untuk program RS-RTLH, yakni pada tahun 2015 berjumlah 103 unit yang kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 80 unit sehingga total keseluruhannya adalah 183 unit. Senada dengan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Banten, APBD Kota Serang yang juga selalu menyumbang setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 sebesar 100 unit, begitupun dengan tahun 2016 sebesar 100 unit sehingga totalnya adalah 200 unit.

Potret seperti ini menunjukkan betapa rentannya permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi. Maka dari itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah

terkait dengan rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus diupayakan dan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah pusat-daerah, dunia usaha, masyarakat dan elemen lainnya.

Dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni ini sebenarnya pemerintah Kota Serang telah bergerak cepat melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang sehat, aman, dan harmonis. Sehingga mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Serang berperan dalam penyelenggaraan perumahan yang layak huni dengan nama kegiatannya yaitu program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Penunjukan SKPD teknis ini sesuai Keputusan Walikota Serang Nomor 979/Kep.15-Huk/2015 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi Bagi Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

Program Rehabilitasi Sosial merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Serang dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi Sosial berarti pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula atau bahkan jauh lebih baik dari keadaan awalnya. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan

kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Realisasi dari program ini yaitu pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang telah dimulai sejak tahun 2011. Landasan yuridis pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin.

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1987/tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang. (Sumber: SK. Kepala Dinas Sosial Kota Serang Nomor 800/Kep.025/DinsosVII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan RS-RTLH)

Kegiatan RS-RTLH melibatkan berbagai pihak mulai dari SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Serang seperti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, dan Dinas Sosial Kota Serang sekaligus yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program. Kemudian aparat Kecamatan, Kelurahan, serta masyarakat. Di tingkat Kecamatan, pelaksana kegiatan terdiri dari Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Nomor: 800/Kep.025/DinsosVII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RS-RTLH). TKSK sendiri ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk melaksanakan pendampingan sosial bagi para penerima bantuan program RS-RTLH. Jumlah TKSK di masing-masing Kecamatan di Kota Serang hanya berjumlah 1 orang.

Sedangkan untuk tingkat Kelurahan/Desa, pelaksana program RS-RTLH adalah aparat dari Kelurahan/Desa bersama tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program RS-RTLH di tingkat Kelurahan, dibantu oleh BKM

(Badan Keswadayaan Masyarakat) atau Karang Taruna, yang kemudian menjadi tim pelaksana bersama dengan Kelurahan dan Dinas Sosial dalam melaksanakan program tersebut. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH perlu melakukan koordinasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga pelaksanaan program RS-RTLH dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Adapun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari program RS-RTLH di Kota Serang pada tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan petunjuk teknisnya berdasarkan pada peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Nomor: 800/Kep.025/DinsosVII/2016 tentang petunjuk teknis program RS-RTLH.

Program RS-RTLH merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi yang jauh lebih penting bahwa bagaimana membangun pola pikir agar mereka memahami dan menyadari bahwa sangat penting memiliki tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Program ini diterapkan di Kota Serang dikarenakan merupakan salah satu program prioritas utama pemerintah kota serang dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.10 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 di Kota Serang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)	Jumlah RTLH
1.	Serang	12	2.788	134
2.	Cipocok Jaya	8	1.912	474
3.	Kasemen	10	5.934	1.391
4.	Taktakan	13	1.542	676
5.	Curug	10	2.524	523
6.	Walantaka	14	2.421	474
Total		67	17.121	3.672
		Sudah Realisasi		1.598
		Belum Realisasi / Sisa		2.074

Sumber: Dinas Sosial, 2016

Berdasarkan uraian tabel diatas, Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan jumlah RTM yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 5.934. RTM Sedangkan Kecamatan Taktakan dengan jumlah RTM sebesar 1.542 menjadi Kecamatan yang paling sedikit jumlah RTM dari seluruh kecamatan di Kota Serang. Berdasarkan data juga, Kecamatan Kasemen menjadi Kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi yaitu sebanyak 1.391 dan urutan terendahnya ditempati oleh Kecamatan Serang dengan jumlah RTLH 134. Berdasarkan pemaparan data di atas, total jumlah RTLH yang mulanya sebesar 3.672 setelah terealisasi 1.598 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menyisakan 2.074 unit RTLH. Adanya penurunan mengenai jumlah rumah tidak layak huni salah satunya karena ada program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

Namun dalam pelaksanaannya, program RS-RTLH di Kota Serang belum berjalan optimal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa

faktanya di lapangan masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program RS-RLTH. *Pertama*, ditinjau dari segi pembinaan kerja (*directing*), program RS-RTLH terbilang kurang optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang dirancang di awal. Seperti tidak adanya kepastian waktu pencairan dana dan jadwal pelaksanaan program RS-RTLH. Juga bila dilihat dari segi perencanaan, program RS-RTLH belum bisa dikatakan matang. Hal ini dilihat dari telah ditetapkan batas waktu untuk merehabilitasi rumah sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Nomor 800/Kep.025/DinsosVII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Tetapi dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, seperti keterlambatan dalam proses pelaksanaan program, yang semestinya dikerjakan di akhir tahun menjadi dikerjakan di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan data-data kelengkapan persyaratan yang mesti dikumpulkan para penerima bantuan kepada Dinas Sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkadang kurang lengkap seperti Kartu Keluarga, Surat Tanda Kepemilikan Tanah, Kartu Tanda Penduduk, serta berkas-berkas lain yang menunjangnya. Hal demikian mengakibatkan penerima bantuan sulit untuk diproses karena pihak Dinas Sosial tidak mau memproses jika dokumen kelengkapan penerima belum lengkap, seperti tidak memiliki Kartu Indonesia Sejahtera, maupun belum mendapat surat rekomendasi atau surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat. Dampaknya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang layak dibantu tidak menjadi prioritas utama

karena terhambat permasalahan tersebut. Di sisi lain hal inipun menghambat proses para penerima bantuan lain yang telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan untuk menerima bantuan. (*sumber: wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang Bapak Agus M. Arif D.J. S.Sos, M.Si. Kamis, 4 Mei 2017 pukul 11:00 di Dinas Sosial Kota Serang*).

Kedua, bila melihat dari segi penganggaran (*budgeting*), pada pelaksanaan program RS-RTLH ini pemberian bantuan kepada penerima terbilang kurang transparan. Program RS-RTLH ini memberikan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai melalui rekening penerima. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi adalah masyarakat hanya sekedar tandatangan dan kemudian memesan bahan-bahan yang diperlukan kepada pihak ketiga dan bahkan terkadang hal ini menimbulkan hutang masyarakat kepada pihak ketiga dikemudian hari dikarenakan mengambil bahan bangunan lebih dari yang dianggarkan. Bila dilihat dari segi penyusunan pegawai (*staffing*), minimnya transparansi akan berapa banyak dana yang sudah dihabiskan masyarakat serta kurangnya pendampingan diakibatkan dari minimnya sumberdaya manusia yang tersedia menyebabkan proses perehaban tidak maksimal dan tidak berjalan dengan semestinya. (*sumber: wawancara dengan Bapak Syukur, S.E, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen Selasa, 16 Mei 2017 pukul 13:00 di Kantor Kelurahan Terumbu*).

Ketiga, termasuk ke dalam kategori perencanaan, program ini masih terkendala surat kepemilikan atau akta tanah. Padahal jelas tertulis di dalam petunjuk teknis pelaksanaan program bahwa persyaratan utama untuk

memperoleh bantuan ini adalah rumah dan tanah yang ditempati adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan keberadaan sertifikat maupun surat keterangan kepemilikan tanah dan bangunan. Tetapi, sejauh pelaksanaannya, masih banyak terdapat RTM yang belum memiliki surat kepemilikan atau akta tanah sehingga proses bantuan RTLH tidak dapat diberikan karena terhambat masalah legalisasi. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang Bapak Agus M. Arif, pihak Dinas Sosial Kota Serang tidak dapat memberikan bantuan jika surat-surat kepemilikan tanah calon penerima bermasalah atau berada dalam tanah sengketa karena akan bermasalah pada laporan pertanggung jawaban dari pihak Dinas Sosial Kota Serang sebagai pemberi bantuan. Masalah ini begitu menghambat proses verifikasi yang mana hal tersebut berdampak pada lamanya proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Serang dan juga jika tidak diverifikasi dengan teliti bisa berakibat pada ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan program RS-RTLH ini.

Keempat, berdasarkan fakta di lapangan koordinasi antar pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Serang, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan, RT RW setempat, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri masih terbilang sangat kurang dan juga belum semua pihak yang terkait dengan program RS-RTLH terlibat langsung dalam pelaksanaan. Berdasarkan fakta di lapangan, baik pihak Kelurahan maupun pihak Kecamatan seringkali terlewatkan informasi terkait calon penerima bantuan program RS-RTLH. Pihak mereka hanya tahu ketika ternyata ada warganya yang mendapatkan bantuan RS-RTLH dan terkadang justru ketika program tersebut telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan

Program RS-RTLH adalah tugas bersama antara Dinas Sosial, Kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial dan TKSK, Kelurahan, serta adanya partisipasi tokoh masyarakat dan masyarakat. Ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan, hanya ada beberapa atau bahkan satu pihak yang turut serta. Program yang semestinya didukung penuh oleh semua pihak yang terlibat menjadi terhambat ketika elemen yang seharusnya menjalankan perannya masing-masing tidak turut berpartisipasi. (*sumber: wawancara dengan Bapak Ahmadi, Sekretaris Kelurahan Kasemen. Kamis, 16 Mei 2017 pukul 14:00 di Kantor Kecamatan Kasemen*).

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang ada di penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : ”Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2016 oleh Dinas Sosial Kota Serang (Studi Kasus Di Kecamatan Kasemen Kota Serang).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendahuluan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak ada kepastian waktu pencairan dana dan jadwal pelaksanaan program RS-RTLH. Yaitu seharusnya ditetapkan batasan waktu pemrosesan data-data yang masuk, juga dijelaskan bahwa jadwal pencairan dana serta pelaksanaan program yang pasti dan konsisten.

Tetapi yang terjadi adalah di juknis hanya dicantumkan batas waktu perehaban yaitu selama 40 hari.

2. Kurang transparan dalam pemberian bantuan kepada penerima. Dengan keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan sehingga pemahaman akan program RS-RTLH yang mengakibatkan mereka hanya sekedar tanda tangan tanpa memahami teknis-teknisnya.
3. Terkendala surat kepemilikan atau akta tanah. Masih banyak ditemukan pemohon bantuan yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah sehingga tidak sesuai persyaratan yang tercantum di dalam juknis.
4. Lemahnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Program ini melibatkan Dinas Sosial Kota Serang, Kecamatan, Kelurahan, RT RW setempat, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri, tetapi faktanya keterlibatan semua pihak masih terbilang sangat kurang dan juga belum semua pihak terlibat langsung dalam pelaksanaan program RS-RTLH

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh. Maka dengan itu peneliti membuat batasan masalah penelitian, yaitu manajemen pengelolaan rehabilitasi sosial tahun 2016 oleh Dinas Sosial dengan studi kasus rumah tidak layak huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti paparkan dalam bahasan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016 oleh Dinas Sosial Kota Serang di Kecamatan Ksemen?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana manajemen rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kota Serang dan juga sebagai bahan masukan untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian, baik manfaat secara praktis maupun teoritis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu:

a. Pengembangan Keilmuan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Daerah

b. Pengembangan Rehabilitasi

Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pelaksanaan rehabilitasi sosial di Kota Serang

1.6.2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, adalah:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang

b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi instansi lokal khususnya Dinas Sosial Kota Serang

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logis. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logis.

1.2 Identifikasi Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi.

1.3 Rumusan Masalah

Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan masalah.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

2.3 Asumsi Dasar Penelitian

Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian

3.2 Instrumen Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.

3.3 Informan Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan

data sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan visual.

3.5 Teknik Analisis Data

Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis dilakukan melalui pengkodean dan berdasarkan kategorisasi data.

3.6 Uji Keabsahan Data

Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari objektivitas dalam subjektivitas. Untuk dapat mendapat data yang objektif berasal dari unsur subjektivitas objek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada.

3.7 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang tahapan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2 Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data dan wawancara narasumber.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

5.2 Saran

Memberikan masukan dari hasil penelitian yang telah diolah secara singkat, jelas, sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Pada bab ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini, dimana berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Teori yang akan digunakan adalah beberapa teori yang mendukung masalah peneliti mengenai Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen).

2.1.1 Definisi Manajemen

Menurut Stoner dalam Handoko (2003:9) menjelaskan definisi manajemen sebagai berikut :

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan tersebut adalah pelayanan/laba.

Sedangkan menurut Hasibuan (2011: 2). Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dititikberatkan bahwa manusia dan sumber-sumber lainnya merupakan aspek yang sangat mempengaruhi proses pencapaian suatu tujuan dalam organisasi, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk mengelola dan mengatur aspek-aspek tersebut.

Disisi lain, manajemen menurut Sikula dalam Hasibuan (2011:2) yang di terjemahkan sebagai berikut:

“bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.”

Dari definisi tersebut manajemen difokuskan pada serangkaian aktivitas dalam proses mengendalikan potensi yang tersedia sehingga mampu menghasilkan sesuatu dengan maksimal. Setiap tahap dalam prosesnya akan sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhirnya nanti.

Berbeda dengan Sikula, H. Koontz & O’Donnel dalam Handayaniingrat (2001:19) menjelaskan definisi manajemen sebagai berikut :

“Management involve getting things done through and with people” (Manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan cara orang-orang lain)

Berdasarkan pemaparan pengertian manajemen diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan manusia amatlah sangat terbatas, dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya yang tidak terbatas. Dalam rangka menyeimbangkan kemampuan terbatas dengan kebutuhan tidak terbatas hal itu

mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian pekerjaan, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan manusia saling terikat dalam satu organisasi. Dalam organisasi maka pekerjaan yang sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun menurut George R. Terry dikutip dalam Handyaningrat (2001:20) menyatakan bahwa manajemen merupakan:

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives”. (Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).

Secara sederhana pengertian manajemen menurut George R. Terry meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*);
- b. Pengorganisasian (*Organizing*);
- c. Penggerakan (*Actuating*);
- d. Pengawasan (*Controlling*);

Definisi lainnya yaitu dikemukakan oleh Tom Degenars, *expert* PBB yang diperbantukan pada kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara dari tahun 1978-1979 (Handyaningrat, 2001:19) memberikan definisi yang sudah diterjemahkan yaitu bahwa didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia. Disini manajemen dititikberatkan pada bimbingan kegiatan kelompok. Dalam proses pencapaian tujuan kelompok tersebut, aspek sumber daya manusia

merupakan aspek yang sangat penting, akan tetapi di sisi lain sumber daya lainnya pun tidak kalah penting.

Berdasarkan pemahaman penulis, defini Stoner dan Wankel dalam Siswanto (2009:2) memberikan batasan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan seluruh sumberdaya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi dapat dikatakan seperti menggabungkan dua pendapat sebelumnya, yaitu George R. Terry dan Tom Degenars dalam mengemukakan definisi manajemen.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi dan sebagainya. Millet dalam Siswanto (2009:1) membatasi manajemen pada suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan, manajemen sebagai suatu ilmu adalah pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi (Siswanto, 2009:7). Senada dengan Handoko (2003:11) yang berpendapat bahwa manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya, misal: ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya. Bidang-bidang ilmu ini dapat dipelajari secara universal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan pekerja atau karyawan (*Staffing*), dan pengawasan (*Controlling*).

2.1.2 Asas-Asas Manajemen

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan intisari kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi tidak mutlak, artinya penerapan asas baru harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas bukanlah hukum atau dogma, tetapi hanya sebagai hipotesis yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis relevan dan konsisten. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar dalam menjalankan pekerjaannya dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar. Menurut Fayol dalam Hasibuan (2011:10) asas-asas umum manajemen adalah:

- a. *Division of work* (asas pembagian kerja)
- b. *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)
- c. *Discipline* (asas disiplin)
- d. *Unity of command* (asas kesatuan perintah)
- e. *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah)
- f. *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi)
- g. *Remuneration of personnel* (asas pembagian gaji yang wajar)

- h. *Centralization* (asas pemusatan wewenang)
- i. *Scharal of chain* (asas hierarki atau asas rantai berkala)
- j. *Order* (asas keteraturan)
- k. *Equaty* (asas keadilan)
- l. *Initiative* (asas inisiatif)
- m. *Esprit de corps* (asas kesatuan)
- n. *Stability of turn-over personnel* (asas keadilan masa jabatan)

Dalam bukunya Taylor *The Principle Of Scientific Management* (Hasibuan, 2011:7) menunjukkan bahwa asas-asas dasar ilmu manajemen dapat dipakai untuk segala macam kegiatan manusia. Taylor mengemukakan asas-asas manajemen sebagai berikut:

1. Pembangunan metode-metode kerja yang baik.
2. Pemilihan serta pengembangan para pekerja.
3. Usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik serta para pekerja yang terpilih dan terlatih.
4. Kerja sama yang harmonis antar manajer dan nonmanajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan.

2.1.3 Proses atau Fungsi Manajemen

Proses diartikan sebagai serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan, sedangkan fungsi adalah tugas atau kegiatan. Akan tetapi pengertian proses dan fungsi dalam hal ini tampaknya diartikan sama, misalnya : William H. Newman, Luther Gullick, George Terry menyebut proses manajemen, sedangkan Mc. Farland, Koontz, F. Taylor menggunakan istilah fungsi manajemen. Henry Fayol mendefinisikan pengertian yang sama antara proses atau fungsi yaitu unsur (*element*).

Hasibuan (2001:37) berpendapat bahwa manajemen oleh para penulis dibagi atas beberapa fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen tersebut tujuannya adalah:

- a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur;
- b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam;
- c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para penulis tidak sama.

Hal ini disebabkan latar belakang penulis, pendekatan yang dilakukan tidak sama.

Untuk bahan perbandingan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli, penulis mengutip fungsi manajemen menurut para ahli, berikut fungsi-fungsi manajemen peneliti sajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

<p>G.R. Terry</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Coordinating</i> 4. <i>Controlling</i> 	<p>John F. Mee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Motivating</i> 4. <i>Controlling</i> 	<p>Louis A. Allen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leading</i> 2. <i>Planning</i> 3. <i>Organizing</i> 4. <i>Controlling</i> 	<p>MC Namara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Programming</i> 3. <i>Budgeting</i> 4. <i>System</i>
<p>Henry Fayol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Commanding</i> 4. <i>Coordinating</i> 5. <i>Controlling</i> 	<p>Harold Koontz & Cyril O'donnel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Staffing</i> 4. <i>Directing</i> 5. <i>Controlling</i> 	<p>Dr.S.P. Siagian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Motivating</i> 4. <i>Controlling</i> 5. <i>Evaluating</i> 	<p>Prof . Drs. Oey Liang Lee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Pengkordinasian 5. Pengontrolan
<p>W.H. Newman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Assembling Resources</i> 4. <i>Directing</i> 5. <i>Controlling</i> 	<p>Luther Gullick</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Planning</i> 2. <i>Organizing</i> 3. <i>Staffing</i> 4. <i>Directing</i> 5. <i>Coordinating</i> 6. <i>Reporting</i> 7. <i>Budgeting</i> 	<p>Lyndall F. Urwick</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Forecasting</i> 2. <i>Planning</i> 3. <i>Organizing</i> 4. <i>Commanding</i> 5. <i>Coordinating</i> 6. <i>Controlling</i> 	<p>John D. Millet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Directing</i> 2. <i>Facilitating</i>

Sumber: (Hasibuan, 2001:38)

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah satu klarifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Fayol, yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama (Handoko, 2003:21).

Fungsi manajemen menurut Terry dalam Handayaniingrat (2001:25) yang dikenal dengan POAC yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*), adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (*future*) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), adalah menentukan, mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Penggerakan Pelaksanaan (*Actuating*), merupakan usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (*Planning*) dan usaha pengorganisasian.
4. Pengawasan (*Controlling*), merupakan proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu, pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.

Koontz dan O'Donnell dalam Handayaniingrat (2001:22) fungsi-fungsi manajemen yang disingkat POSDICO yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*), berhubungan dengan pemilihan sasaran/tujuan (*objective*), strategi, kebijaksanaan, program dan prosedur pencapaiannya. Perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan, manakala perencanaan ini menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif.

2. Pengorganisasian (*Organizing*), berhubungan dengan pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan dari pada suatu badan usaha secara keseluruhan atau setiap bagiannya. Pengelompokkan kegiatan-kegiatannya, penugasan, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, kewenangan dan hubungan informal baik horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi itu.
3. Penyusunan pegawai (*Staffing*), berhubungan dengan penempatan orang-orang, yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Pembinaan dan kepemimpinan (*Directing and Leading*), merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Pimpinan atas harus memperhitungkan bawahannya terhadap nilai-nilai kebiasaan, sasaran/tujuan dan kebijaksanaan organisasi/badan usaha. Pihak bawahan diusahakan agar banyak mengetahui terhadap struktur organisasi, hubungan yang saling ketergantungan dari pada kegiatan dan kedudukan pribadinya, tugas-tugasnya dan wewenangnya.
5. Pengawasan (*Controlling*), merupakan tindakan penilaian/perbaikan terhadap bawahan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Jadi penilaiannya apakah hasil pelaksanaannya tidak bertentangan dengan sasaran (*goals*) dan rencananya (*plans*).

William H. Newman dalam Handayani (2001:20) mendefinisikan “*The Work of Administrator/Manager*” dengan akronim POASCO, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*), perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode & prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya (atasan dan bawahan) di dalam setiap unit.
3. Pengumpulan Sumber (*Assembling Resources*), pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan dari pada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang/*capital*, alat-alat/fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
4. Pengendalian kerja (*Supervising*), bimbingan dari pada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan instruksi, motivasi agar mereka secara sadar menuruti segala instruksinya, mengadakan koordinasi dari pada berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja baik antara atasan dan bawahan
5. Pengawasan (*Controlling*), pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai

dengan rencana. Hal ini menyangkut penentuan standar. Artinya membandingkan antar kenyataan dengan standar dan bila perlu mengadakan koreksi/pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang dari pada rencana.

Sedangkan fungsi manajemen menurut Mee dalam Handayani (2001:26) yang dikenal dengan akronim POMCO, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*), adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), seluruh proses pengelompokkan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemberian Motivasi (*Motivating*), seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
4. Pengawasan (*Controlling*), proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) mendefinisikan bahwa manajemen sebagai berikut:

“suatu bidang ilmu pengetahuan (*Science*) yang berusaha secara sistematis untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia”

Secara sederhana fungsi-fungsi manajemen menurut Luther Gulick yang terkenal dengan akronim POSDCORB, adalah:

1. Perencanaan (*Planning*), adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud/tujuan badan usaha itu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), menetapkan struktur formal dari pada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*), keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.

4. Pembinaan Kerja (*Directing*), tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi.
5. Pengkoordinasian (*Coordinating*), kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan dari pada pekerjaan.
6. Pelaporan (*Reporting*), pimpinan yang bertanggung jawab harus selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. Penganggaran (*Budgeting*), semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha dalam bentuk rencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai fungsi manajemen dari beberapa para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi manajemen diantaranya terdapat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), serta pengawasan (*controlling*). Jika fungsi-fungsi manajemen tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan dari suatu instansi, baik itu instansi negara ataupun swasta akan sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk dapat memaparkan secara jelas mengenai sub dari fungsi manajemen tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Perencanaan

Perencanaan (*Planning*) adalah fungsi dasar manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang tidak pasti, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.

Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan, dimana dilihat dari resiko semua kegiatan yang ditanggung apakah relatif kecil atau besar. Tindakan dan kebijakan suatu instansi direncanakan di awal, dimana

efektif atau tidaknya hasil perencanaan akan terlihat di akhir. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.

Menurut Terry (2007:92) “perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa mendatang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

Sedangkan menurut Hasibuan “rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu.” Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman.

Jenis-jenis rencana menurut Hasibuan (2011:95) adalah:

1. Tujuan

Tujuan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Tujuan yang diinginkan harus wajar, rasional, ideal dan cukup menantang untuk diperjuangkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan secara matang sejak awal agar perencanaan secara keseluruhan tidak mengambang.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berpikir dalam menentukan keputusan. Fungsinya adalah menandai lingkungan di sekitar yang dibuat, sehingga memberikan jaminan keputusan-

keputusan itu akan sesuai dan menyokong tercapainya arah tujuan. Disini penulis mengartikan kebijaksanaan sebagai arah cara berpikir guna dalam proses pelaksanaannya mampu memberikan konsekuensi sehingga keputusan yang dibuat di awal akan terlaksana sebagaimana mestinya serta tercapainya tujuan utama.

3. Prosedur

Prosedur merupakan suatu jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas masa depan. Prosedur merupakan petunjuk-petunjuk untuk tindakan dan bukan untuk cara berpikir. Prosedur memberikan detail-detail tindakan, sehingga suatu aktivitas tertentu harus dilaksanakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah rentetan tindakan yang diatur secara kronologis atau berurutan yang menjadi dasar suatu tindakan dilakukan.

4. *Rule*

Rule adalah rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. *Rule* kadang-kadang ditimbulkan oleh prosedur, tetapi keadaannya tidak sama. Dengan kata lain *rule* merupakan batasan akan proses pelaksanaan pencapaian agar berjalan sebagaimana mestinya.

5. Program

Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Rencana ini konkret, karena

dalam program sudah tercantum, baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Penulis menarik kesimpulan bahwa program merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan berbagai rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

6. *Budget*

Budget adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Dengan kata lain *budget* didefinisikan sebagai gambaran penganggaran terkait suatu program yang akan dilaksanakan.

7. Metode

Metode merupakan hal yang fundamental bagi setiap tindakan dan hubungan dengan prosedur. Suatu prosedur terdiri dari serangkaian tindakan. Suatu metode dapat didefinisikan sebagai hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang dan usaha (Terry dalam Hasibuan 2011:102). Penulis mengartikan bahwa metode merupakan pedoman cara berpikir untuk mengelola segala aspek, berkaitan dengan pelaksanaan program.

8. Strategi

Strategi juga termasuk jenis rencana, karena akan menentukan tindakan pada masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor-faktor penting yang menjadi perhatian dan perhitungan dalam menentukan strategi adalah:

- a. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dari pada pihak-pihak saingan.
- b. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan-kelemahan pihak saingan
- c. Memperhitungkan keadaan lingkungan *intern* maupun *ekstern* yang dapat mempengaruhi perusahaan
- d. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial dan psikologis
- e. Memperhitungkan faktor-faktor sosio-kultural dan hukum
- f. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis
- g. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak saingan

Pendekatan dalam fungsi perencanaan dalam buku Siagian (2008:90) dapat ditinjau dari tiga segi atau cara yaitu *pertama*, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. *Kedua*, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus di pecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan.

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema,

bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.

Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang sifatnya statis. Jika pengorganisasian baik maka organisasinya pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai.

Siagian (2008:95) berpendapat “organisasi yaitu setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang/sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan.”

Sedangkan pengorganisasian menurut Hasibuan yaitu “suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.”

Menurut Hasibuan (2011:122) unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Manusia, artinya organisasi baru ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukan.
3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.

5. Struktur, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis.
7. Lingkungan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Sedangkan pengorganisasian menurut Terry dalam Hasibuan (2011 :119) yaitu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

C. Pengarahan

Pengarahan adalah fungsi manajemen yang paling penting dan dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dapat merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks, karena karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lainnya.

Menurut Hasibuan (2011:183) pengarahan yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Senada dengan Hasibuan, Terry (2007:183) menyebut pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Sedangkan menurut Koontz dan O'Donnel (2011:184)

“pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata”

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

D. Pengkoordinasian

Terdapat beberapa definisi koordinasi berdasarkan pendapat dari para ahli, diantaranya menurut Brech dalam Hasibuan (2011:85) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut Djamin dalam Hasibuan (2011:86) koordinasi adalah suatu usaha kerja antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Hasibuan (2011:86) menyebutkan bahwa ada beberapa tipe koordinasi diantaranya:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit,

kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Koordinasi horizontal dibagi atas:

- a) *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
- b) *Interrelated* adalah koordinasi antar badan, unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Sifat-sifat koordinasi menurut Hasibuan (2011:87) adalah:

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang dalam rangka mencapai sasaran
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan

Tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2011:87) yaitu:

1. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan
2. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan
3. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
4. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

Penulis menyimpulkan bahwa koordinasi merupakan hubungan timbal balik antara tiap bagian terkait dalam rangka penyatuan visi dan misi sehingga mampu melengkapi setiap ketimpangan yang terjadi dan pada akhirnya mempermudah pelaksanaan pencapaian tujuan.

E. Pengendalian

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Pengendalian menurut Terry dalam Hasibuan (2011:242) yaitu dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sedangkan menurut Koontz dalam Hasibuan (2011:242) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2011:242) tujuan pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan dari rencana
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpanganpenyimpangan
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan benar-benar sesuai dengan rencana

Cara-cara pengendalian atau pengawasan ini dilakukan melalui :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pengendalian disini amatlah krusial. Karena merupakan fungsi yang terakhir, pengendalian dapat dikatakan sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.

Penulis memilih menggunakan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Luther Gullick yang biasa disebut POSDCORB yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*, karena peneliti beranggapan bahwa teori tersebut sangat relevan dengan masalah-masalah penelitian ini, serta teori tersebut dianggap lebih komplit dalam membahas manajemen dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan teori fungsi manajemen lainnya.

2.1.4 Filsafat Manajemen

Filsafat manajemen adalah kerja sama saling menguntungkan, bekerja efektif dan dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang terbaik (Hasibuan, 2011:5)

Selanjutnya Taylor (2011:6) mengemukakan bahwa dalam filsafat manajemen, manajer akan lebih bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian serta dalam menafsirkan kepandaian-kepandaian para pekerja dan mesin-mesin menurut aturan-aturan, hukum-hukum dan formula-formula, sehingga dengan jalan demikian akan membantu pekerja-pekerja melakukan pekerjaannya dengan biaya yang rendah namun memberikan penghasilan yang besar.

Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan dan penanggung jawab hasil yang dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu. Dengan pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil keputusan maka aktivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis.

Sebaliknya pemimpin yang tidak kreatif, cakap dan tidak berani mengambil keputusan maka aktivitas organisasinya statis. Jadi, pemimpin dan wewenang kepemimpinannya merupakan intisari manajemen.

Filsafat manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajer.

Terdapat beberapa manfaat filsafat manajemen, yaitu:

1. Memberikan suatu dasar dan pedoman bagi pekerjaan manajer.
2. Memberikan kepercayaan dan pegangan bagi manajer dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan.
3. Memberikan dasar dan pedoman berpikir efektif bagi manajer.
4. Dapat dipergunakan untuk mendapatkan sokongan dan partisipasi para bawahan, jika mereka mengetahui manajer dan mengerti tindakantindakannya, asalkan mereka telah menghayati filsafat manajemen.
5. Memberikan pedoman arah pemecahan yang terbaik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manajer.
6. Menjadi pedoman dasar dan kepercayaan bagi manajer dalam melakukan wewenang kepemimpinan.

2.1.5 Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai (Hasibuan, 2011: 17). Tujuan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non materi dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan/pengabdian (*public organization*) melalui proses manajemen itu. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya ditetapkan “jelas, realistis dan cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Jika tujuannya jelas, realistis dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup

besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu mudah/muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi, semangat kerja karyawan akan termotivasi jika tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk dicapainya.

2.1.6 Definisi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yg berguna dan memiliki tempat di masyarakat (KBBI, 1998:92).

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

Dapat diartikan kesimpulan bahwa rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan guna untuk merubah mindset seseorang agar berubah lebih baik lagi seperti sebagaimana mestinya, agar dapat diterima kembali di kalangan masyarakat secara luas.

2.1.7 Definisi Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah

permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila:

a. Kondisi Rumah

1. Luas lantai perkapita kota < 4 m², desa < 10 m².
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
3. Tidak mempunyai akses mandi, cuci dan kakus.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari tanah dan rumah lembab.
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.

b. Kondisi Lingkungan

- a. Lingkungan kumuh dan becek.
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
- c. Jalan setapak tidak teratur.

(<http://www.kemsos.go.id/moduls> Diakses pada pukul 29 Oktober 2017)

2.1.8 Definisi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Huni (RSTLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses umum.

A. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
2. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak permanen dan / atau rusak;
 - b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti: papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dsb;
 - c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan;
 - d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak;
 - e. Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

B. Kriteria Sarana dan Prasarana Lingkungan

Sarana prasarana lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan:

- a. Terletak pada lokasi RS-RTLH;
- b. Merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama warga miskin;
- c. Menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat;
- d. Legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- e. Masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki seperti: lahan, tenaga dan material.

C. Kelompok Penerima Bantuan

Kepala Keluarga penerima bantuan dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai dengan 10 KK. Tugas kelompok adalah:

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
2. Membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditandatangani ketua dan bendahara;
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi;
4. Menetapkan toko bangunan yang menjamin penyediaan barang;
5. Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan;
6. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan maksimal sebesar Rp. 12.500.000,- setiap rumah untuk disetujui oleh Dinas Sosial Kab/Kota;
7. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok;
8. Setelah uang diterima, ketua membuat dan menandatangani tanda terima uang bantuan dari Kementerian Sosial sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui aparat desa/kelurahan setempat dan segera dikirim ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan RS-RTLH kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dengan malampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah diselesaikannya pekerjaan yang diketahui Kepala Desa/Lurah.

D. Masyarakat

1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan;
2. Bersama kelompok dan Tim Pembangunan Sarling melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan.

E. Prosedur Pengusulan Kegiatan

Prosedur pengusulan penerima bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kab/Kota bersama TKSK/PSM/Karang Taruna/Orsos/Aparat desa/Kelurahan melakukan pendataan KK calon penerima RTLH;
2. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Sosial/Instansi Kab/Kota mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima (*by name by address*) dan foto rumah;
3. Ditjen Pemberdayaan Sosial cq Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan;
4. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan Ditjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan SK Penerapan KK penerima bantuan RS-RTLH dan alokasi Sarling;
5. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam SK Dirjen Pemberdayaan Sosial tidak dapat diganti

F. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Pelaksanaan Bantuan
 - a. Verifikasi proposal RS-RTLH dan Sarling;
 - b. Penjajagan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan;
 - c. Sosialisasi; Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling.

- 1) Sasaran kegiatan sosialisasi mencakup:
 - Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
 - 2) Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - 3) Unsur Masyarakat;
 - 4) Pendamping (TKSK).
- d. Membangun dan mengembangkan komitmen untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program;
- e. Penentuan lokasi dan calon penerima;
- f. Verifikasi Calon Penerima Bantuan;
- g. Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling:
 - 1) Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - 2) Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
 - 3) Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
 - 4) Melaksanakan pembelian bahan bangunan;
 - 5) Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah dan pembangunan Sarling;
 - 6) Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling telah selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok.

2. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, mencakup:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana operasional dan Sarling masing-masing Kab/Kota selambat-lambatnya akhir tahun anggaran;
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan RS-RTLH masing-masing kelompok dan Sarling setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dan Sarling dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, maka dalam hal ini peneliti mencari beberapa penelitian yang telah dilakukan melalui skripsi yang membahas tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Berikut adalah skripsi terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adi Fajar Nugraha, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Penelitian tersebut berbentuk skripsi yang membahas mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang pada tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Charles O'Jones yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, masih ada dari pihak pelaksana belum sepenuhnya sosialisasi program RS-RTLH menyentuh masyarakat.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik analisis data yang menggunakan teknis analisis data dari Miles dan Huberman serta lokus yang diteliti sama-sama berada di Kota Serang.

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu teori yang menjadi pisau analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adi Fajar Nugraha yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O'Jones yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Sedangkan peneliti menggunakan teori mengenai fungsi manajemen dari Luther Gulick *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pembinaan Kerja), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), *Budgeting* (PENGANGGARAN).

Kedua, Edyta Widi Nugraheni, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Penelitian tersebut berbentuk skripsi yang membahas mengenai Manajemen Bantuan Rumah Tangga Miskin Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Oleh Bapermas, Perempuan, KB, dan Ketahanan Pangan Di Kota Salatiga pada tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Bantuan Sosial Rumah Tangga Miskin untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni oleh Bapermas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh G. R. Terry yaitu POAC, yang meliputi kegiatan-kegiatan *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Keempat fungsi manajemen tersebut dianggap relevan dengan Manajemen Bantuan Sosial Rumah Tangga Miskin untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni oleh Bapermas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Salatiga. Ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Validitas data menggunakan triangulasi data, teknik analisis data menggunakan analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Manajemen Bantuan Sosial Rumah Tangga Miskin untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan telah berjalan dengan baik. Perencanaan menggunakan pendekatan gabungan *top-down* dan *bottom-up* dimana antara Bapermas dan masyarakat berperan aktif dalam perencanaan. Pengorganisasian bantuan sosial RTM melalui pembentukan Kelompok Kerja di tingkat Kelurahan dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan dan Tim Verifikasi pada Bapermas dengan pembagian struktur dan

pembagian kerja sesuai SK Kepala Bapermas. Penggerakan dilakukan dengan mengarahkan masyarakat setempat untuk terlibat dalam membantu pemugaran rumah dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan teratur dan baik. Pengawasan bantuan sosial RTM dilakukan secara keseluruhan oleh Ketua Kelompok Kerja. Kelompok Kerja wajib membuat laporan pertanggungjawaban setelah pemugaran rumah selesai, dilakukan dan dilaporkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesai pemugaran. Secara keseluruhan pelaksanaan program bantuan sosial RTM di Kota Salatiga ini sudah berjalan cukup teratur dan baik, bahkan sampai sekarang pun program ini masih tetap berjalan dan rumah yang telah dipugar kualitasnya jauh lebih baik dari sebelum dipugar.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang sama-sama menggunakan teknik wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi teori yang digunakan, walaupun menggunakan teori fungsi manajemen akan tetapi mazhab yang digunakan berbeda dalam penelitian yang dilakukan Edyta Widi Nugraheni ini menggunakan teori fungsi manajemen dari G. R. Terry yaitu POAC, yang meliputi kegiatan-kegiatan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sedangkan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dari Luther Gullick yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pembinaan Kerja), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), *Budgeting* (Penganggaran).

Kemudian terakhir, penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Nadia Dewinta dan H. Muhammad Ridwan. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau terkait Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2011. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi para pelaksana program. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) yang didasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program ini cukup baik karena hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang terjadi. Terdapat pula beberapa kendala dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, diantaranya berupa kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada sasaran RS-RTLH, dan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program RS-RTLH yang antara lain disebabkan oleh waktu yang diberikan, keterlambatan datangnya bahan bangunan serta oleh faktor cuaca yang tidak mendukung.

Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari segi metode penelitiannya, yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi lokus penelitian yang mana peneliti sendiri mengambil lokus di Kota Serang khususnya di Kecamatan Kasemen sedangkan dalam penelitian jurnal ini lokusnya di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Teori yang digunakanpun berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen dari Luther Gulick yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, pengkoordinasian, pelaporan, penganggaran, sedangkan yang digunakan oleh penelitian ini adalah analisis yang berdasarkan data yang dihasil kan dari wawancara dan dari data-data yang ada.

2.3. Kerangka Berfikir

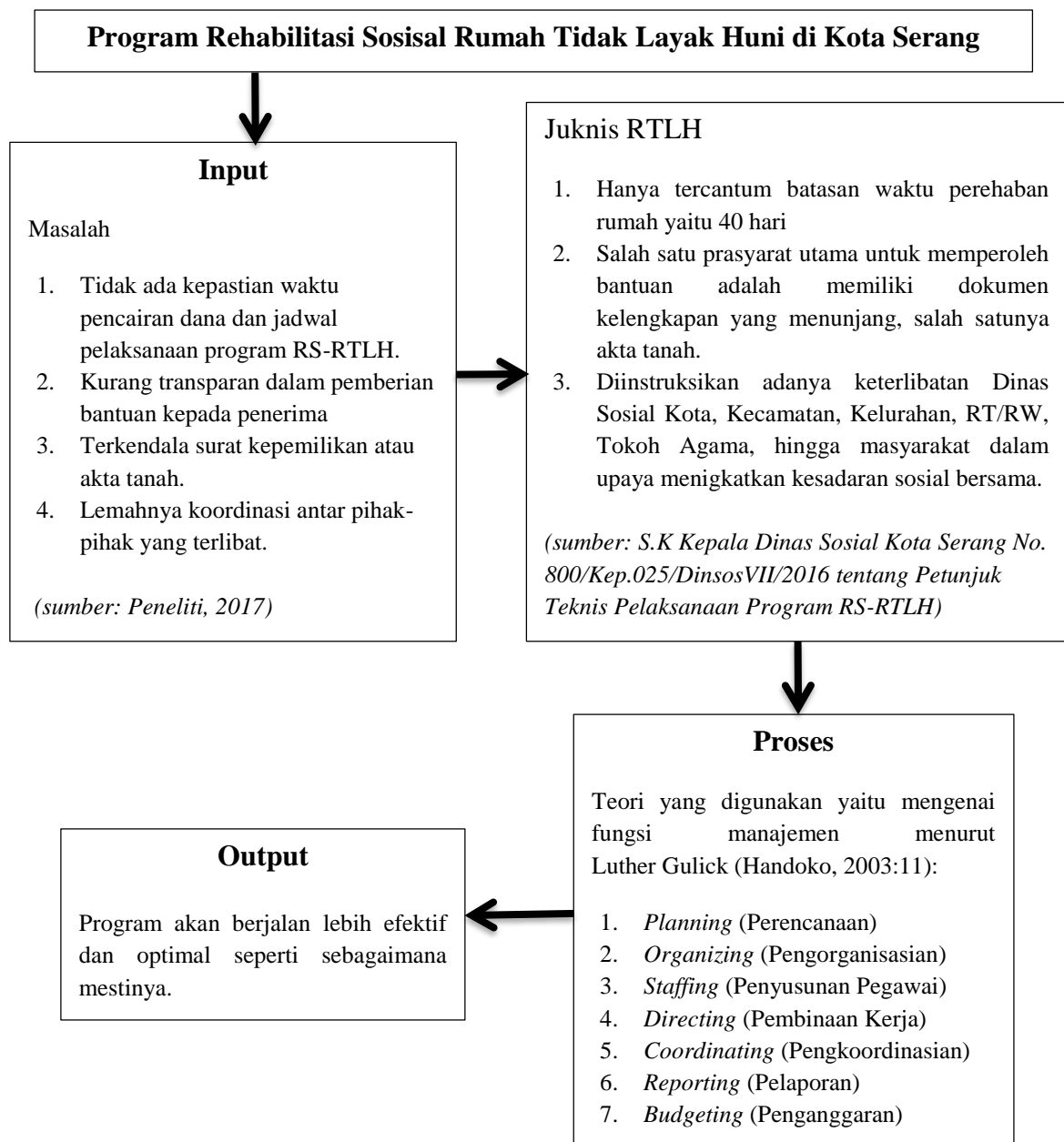
Kerangka berpikir merupakan alur berpikir dalam sebuah penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti, maka kerangka berfikir sebagai berikut., maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut:

Dinas Sosial Kota Serang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang membantu pemerintah daerah dalam permasalahan sosial di Kota Serang. Salah satu masalah sosial yaitu rumah tidak layak huni. Sampai sekarang masih ditemukan beragam permasalahan, seperti pelaksanaan program yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan, kurangnya transparansi dalam pemberian bantuan kepada penerima bantuan, masih terkendala surat kepemilikan atau akta tanah sehingga bantuan tidak dapat diberikan., dan lemahnya kordinasi serta belum optimalnya peran serta pihak-pihak terkait.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, mengenai manajemen program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kota Serang, maka peneliti memilih fungsi manajemen menurut Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) yang di dalamnya berisi mengenai *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pembinaan Kerja), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), *Budgeting* (PENGANGGARAN) karena peneliti beranggapan bahwa teori tersebut sangat relevan dengan masalah-masalah penelitian, serta lebih komplit dalam membahas manajemen dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan teori fungsi

manajemen lainnya, maka akan diketahui bagaimana manajemen rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial Kota Serang tahun 2016 (studi kasus di Kecamatan Kasemen).

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Peneliti, 2017

2.4. Asumsi Dasar

Menurut Arikunto (2002:61) asumsi atau tanggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh penulis yang dirumuskan secara jelas. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang peneliti paparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang Tahun 2016 dengan Studi Kasus di Kecamatan Kasemen belum terlaksana dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah pusat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, agar apa yang menjadi hasilnya merupakan hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan penulis adalah melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Moloeng (2006:19) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian terdapat empat tahapan, yaitu :

1. Tahap Sebelum Kelapangan
Kegiatan penentuan fokus penelitian, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakkan alat peneliti, mencakup observasi lapangan, permohonan terhadap subjek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan fokus penelitian
3. Tahap Analisis Data
Analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen, maupun wawancara mendalam dengan dilakukannya penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya mengecek keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dari metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap Penulisan Laporan
Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan selama di lapangan bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah pada manajemen rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Serang, dimana letak kantor Dinas Sosial Kota Serang berada di Kebon Jahe Kecamatan Serang Kota Serang. Alasan peneliti mengambil lokus di Kota Serang karena

masih terdapat banyak rumah tidak layak huni di Kota Serang yang merupakan ibukota dari Provinsi Banten, yang pada tahun 2016 berjumlah 2.476 unit rumah.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:306)

Menurut Irawan, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument terpenting adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian memiliki ciri tersendiri, seperti yang disebutkan Nasution dalam Sugiyono (2005: 61-62), yaitu:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu test/angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya.
6. Manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan segera untuk penelitian.
7. Manusia sebagai instrument, respon yang aneh dan menyimpang dapat diberi perhatian bahkan yang bertentangan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dengan tingkat pemahaman yang diteliti.

3.5 Informan penelitian

Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*key informan*) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (*secondary informan*) berfungsi

sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi secara langsung.

Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan fakta. Berikut informan yang menurut peneliti layak sesuai judul yang peneliti ambil diantaranya :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Dinas Sosial Kota Serang a. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kota Serang b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kota Serang	<i>Key Informan</i>
2.	Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Serang Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Serang	<i>Secondary Informan</i>
3.	Kecamatan Kasemen a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kecamatan Kasemen b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	<i>Secondary Informan</i> <i>Key Informan</i>
4.	Kelurahan Kasunyatan Sekretaris Kelurahan Kasunyatan	<i>Secondary Informan</i>
5	Masyarakat a. Masyarakat Kecamatan Kasemen b. Masyarakat Kecamatan Kasemen c. Masyarakat Kecamatan Kasemen	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2017)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta dan wawancara mendalam. (Sugiyono, 2008:319)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber-sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan data kali ini yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2006:186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Wawancara dapat dilakukan melalui tahap tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Data ini di dapat dengan cara melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah mengenai fokus penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui kevaliditasannya.

Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan teori dari Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, pengkoordinasian, pelaporan dan anggaran. Adapun indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada informan merupakan pengembangan dari teori tersebut, tujuannya tentu saja untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antar peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang di dapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut tabel pedoman wawancara dalam penelitian ini

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Subdimensi
1.	<i>Planning</i> (Perencanaan)	a. Gambaran Program b. Tujuan Program
2.	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	a. Pembagian tugas-tugas pegawai
3.	<i>Staffing</i> (Penyusunan Pegawai)	a. Penempatan pegawai sesuai dengan ahlinya
4.	<i>Directing</i> (Pembinaan Kerja)	a. Pembinaan pegawai b. Pelatihan pegawai
5.	<i>Coordinating</i> (Pengkoordinasian)	a. Koordinasi dengan pihak ketiga b. Koordinasi tiap bagian
6.	<i>Reporting</i> (Pelaporan)	a. Pelaporan bulanan
7.	<i>Budgeting</i> (Penganggaran)	a. Rencana anggaran b. Pengawasan anggaran

Sumber : Handoko (2003:11)

2. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan menurut Moleong (2006:126) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perilaku tidak sadar dan lain sebagainya. Tujuan observasi untuk penelitian adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses dan untuk menyajikan kembali gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain.

3. Studi Dokumentasi

Studi yang digunakan untuk mencari data memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) catatan serta dokumen dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Studi Kepustakaan

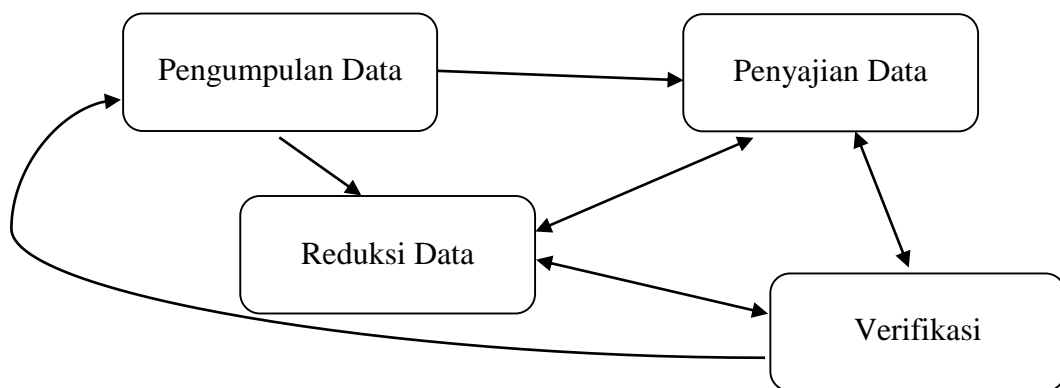
Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini kepustakaan meliputi studi literatur dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca buku, surat kabar, laporan serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan penelitian selesai. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang

telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut gambar teknik analisis data menurut Miles dan Hiberman:

Gambar 3.1
Analisis Data



Sumber : (Miles dan Huberman, 1984)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Ketiga hal itu diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat

menyulitkan peneliti. Oleh karena itu, proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi. Proses informasi ini berlanjut terus sampai laporan penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data

Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis interaktif adalah verifikasi data. Dari awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan

akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8. Triangulasi

Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode (teknik) sebagai berikut:

1. Triangulasi data (sumber)
Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi metode (teknik)
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.3:

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Serang, gambaran umum Dinas Sosial Kota Serang. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2007. Secara administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 66 kelurahan. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 km² atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar 25,88 km². Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2007, disebutkan bahwa Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 266,71 km², sedangkan hasil inventarisasi luas wilayah dari 6 (enam) kecamatan tersebut adalah 266,74 km² atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang rincian jumlah kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	%
1	Curug	10	49,6	18,59
2	Walantaka	14	48,48	18,18
3	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
4	Serang	12	25,88	9,70
5	Taktakan	13	47,88	17,95
6	Kasemen	10	63,36	23,75
Jumlah		67	266,74	100,00

Sumber: BPS Kota Serang

Sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2007 Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- (1) sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten;
- (2) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- (3) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Serang

a. Visi Kota Serang

”Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.”

b. Misi Kota Serang

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur;
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan;
3. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan serta Optimalisasi Potensi Pertanian dan Kelautan; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum, dan Peningkatan Penghayatan terhadap Nilai Agama.

4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kota Serang

Dalam konteks demografi, menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014 Kota Serang memiliki jumlah penduduk 589,581 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 305.119 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 284.462 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.210 jiwa per km² pada tahun 2013.

Bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kota Serang didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 450.609 jiwa atau sekitar 76,43%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun masing-masing sebesar 121.800 jiwa (20,66%) dan 17.172 (2,91%). Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dari tabel komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur sepanjang tahun 2010-2013 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2013

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0 – 4	36,703
2	5 – 9	41,314
3	10 -14	43,783
4	15 – 19	56,135
5	20 – 24	63,327
6	25 – 29	65,164
7	30 – 34	63,494
8	35 – 39	56,448
9	40 – 44	48,497
10	45 – 49	37,583
11	50 – 54	28,109
12	55 – 59	19,432
13	60 – 64	12,420
14	65 – 69	7,460
15	70 – 74	5,240
16	75 >	4,472
Jumlah		589,581

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

Sedangkan dalam hal tingkat pendidikannya, penduduk Kota Serang sebagian besar tamat sekolah dasar (34,80%), diikuti penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 22,57%, serta penduduk berpendidikan SMA/ sederajat sebanyak 21,81%, dan berpendidikan SMP/ sederajat sebanyak 14,38%. Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan Tahun 2013

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	113.844	19,31
2	Belum Tamat SD	19.247	3,26
3	Tamat SD	205.191	34,80
4	SLTP	84.8	14,38
5	SLTA	128.584	21,81
6	D-I/II	3.449	0,58
7	DIII	7.963	1,35
8	DIV/S1	24.298	4,12
9	S2	2.09	0,35
10	S3	115	0,02
Total		589.581	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

Mayoritas penduduk Kota Serang merupakan penganut agama Islam. Namun meskipun didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, terdapat keragaman agama yang dianut penduduknya. Keragaman tersebut telah mencerminkan Kota Serang tumbuh sebagai kota yang heterogen. Hal ini tampak dari komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	576.157	97,72
2	Kristen Protestan	67.52	1,15
3	Kristen Katholik	34.26	0,58
4	Hindu	297	0,05
5	Budha	2.945	0,50
6	Kepercayaan	4	0,0007

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Serang

Dinas Sosial Kota Serang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Dinas Kota Serang dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

4.1.2.1 Kedudukan Dinas Sosial Kota Serang

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang

a. Visi

“Terwujudnya Kemandirian Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan infrastruktur dalam penataan kelembagaan
2. Meningkatkan akses pelayanan sosial dalam aspek: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Memperkuat kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk mendorong inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, organisasi sosial, karang taruna, TKSM dan lembaga sosial keagamaan agar terjalin hubungan kemitraan yang baik dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan sistem informasi pelaporan

4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Serang

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan Bidang Sosial
2. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Sosial
4. Pembinaan, Koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.2.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Serang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
 - c. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
 - b. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

6. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan
 1. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 2. Kepala Seksi Penanganan dan Penataan Lingkungan Sosial
 3. Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis

4.1.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan tersebut, maka ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategi Pertama “Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, dengan kebijakan:

- a. Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan beras miskin
- b. Jumlah keluarga miskin yang telah mendapatkan keterampilan berusaha
- c. Jumlah keluarga miskin yang telah mendapatkan fasilitas manajemen usaha
- d. Jumlah Lansia dan PMKS lainnya yang telah mendapatkan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan serta upaya peningkatan kesehatan, dan prasarana Komda Lansia
- e. Jumlah keluarga fakir miskin yang telah mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- f. Jumlah wanita korban tindak kekerasan dan eksploitasi yang mendapatkan perlindungan soisal dan hukum dan bantuan sosial serta mendapatkan bimbingan dan pelatihan keterampilan
- g. Jumlah masyarakat/PMKS yang menjadi peserta dan mengikuti Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) konseling dan kampanye sosial dalam rangka peningkatan pemahaman mengenal PMKS

- h. Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek kerja
- i. Jumlah tenaga pelatih dan pendidik yang terbina dan mendapatkan pelatihan keterampilan
- j. Jumlah masyarakat dan dinas instansi yang telah menjadi peserta sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan terbentuknya TPKH Tingkat Kota Serang dan terlaksananya validasi dan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (Jaminan Kesehatan Nasional)
- k. Jumlah anak terlantar, yatim piatu yang dapat terpantau dan mendapatkan pembinaan dan pengembangan bakat dan keterampilan serta mendapatkan bantuan sosial
- l. Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan
- m. Jumlah lembaga/anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang telah mendapatkan pembinaan
- n. Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks napi, eks napza) yang terbina dan mendapatkan pelatihan keterampilan
- o. Tersedianya tempat persediaan bufferstock, bahan bufferstock dan sekretariat tagana, meningkatnya keterampilan kesiapsiagaan bencana bagi anggota tagana dan masyarakat serta terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB)

Sasaran Strategi Kedua “Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan terorganisir”, dengan kebijakan :

- a. Jumlah kelompok masyarakat, dunia usaha dan Pengembangan Sosial Masyarakat (PSM) yang telah mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang Undian Gratis Berhadiah (UGB), Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan terpelihara sarana dan prasarana kepahlawanan
- c. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang telah mendapatkan pembinaan
- d. Jumlah anggota karang taruna yang telah mendapatkan pelatihan manajemen

4.1.2.6 Program Prioritas OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

Kota Serang, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Cacat dan kelompok rentan lainnya
- c. Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial
- d. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial
- e. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai – nilai sosial budaya bangsa
- f. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber – sumber kesejahteraan sosial
- g. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
- h. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan

Program – program yang mendukung sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
 - a. Peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya

- b. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - c. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - d. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - e. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
 - b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
 - d. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya – upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
 - e. Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 3. Program Pembinaan anak terlantar berupa Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
 4. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma berupa Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
 5. Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo berupa Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
 6. Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial (eks narapidana, Pekerja Seks Komersial, narkoba dan penyakit sosial lainnya) berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - b. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku – pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat

- d. Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan
- e. Pendataan dan *Updating* data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

4.2. Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, mengenai Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen). Peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut Luther Gullick dalam Handoko (2003:11) yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan),
2. *Organizing* (Pengorganisasian),
3. *Staffing* (Penyusunan Pegawai),
4. *Directing* (Pembinaan Kerja),
5. *Coordinating* (Pengkoordinasian),
6. *Reporting* (Pelaporan) dan
7. *Budgeting* (Penggangan)

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III sebelumnya, bahwa dalam prosesnya, analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman (2009:16), yaitu selama penelitian dilakukan dengan menggunakan empat tahap penting, diantaranya : pengumpulan data (*data collection*) yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :

1. Kode Q untuk menunjukkan kode pertanyaan
2. Kode Q₁, Q₂, Q₃ dan seterusnya untuk menunjukkan urutan pertanyaan
3. Kode I untuk menunjukkan informan
4. Kode I₁, I₂, I₃ dan seterusnya untuk menunjukkan urutan informan
5. Kode I_{1.1}, I_{1.2}, menunjukkan daftar informan dari kategori Pegawai Dinas Sosial Kota Serang
6. Kode I_{2.1}, I_{2.2}, I_{2.3} menunjukkan daftar informan dari pengemis
7. Kode I_{3.1}, I_{3.2}, I_{3.3} menunjukkan daftar informan dari masyarakat Kota Serang

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data, penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo 2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Analisis data kualitatif yang terakhir menurut Miles dan Huberman (2009 :16) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data bersifat jenuh artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

4.2.2 Data Informan Peneliti

Dalam penelitian ini yang berjudul “Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen)”, peneliti melibatkan informan-informan yang dipilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklasifikasikan informan kedalam dua jenis yaitu *key informan* dan *secondary informan*, dimana *key informan* atau informan kunci peneliti pilih dari instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Serang (yang terdiri dari Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin) serta dari pihak Kecamatan (yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen) Sedangkan *secondary informan* atau informan pembantu peneliti melibatkan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Serang, pihak kecamatan Kasemen, pihak kelurahan kasunyatan, serta masyarakat penerima bantuan RS-RTLH yang ada di Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen.

Adapun informan-informan pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.5

di bawah ini:

Tabel 4.5 Data Informan Peneliti

Informan		Nama Informan	Kode Informan	Kategori Informan
Dinas Sosial Kota Serang	1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Agus M. Arif D.J	I _{1.1}	<i>Key Informan</i>
	2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin,	Iin Maya Aliyyuida	I _{1.2}	<i>Key Informan</i>
Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Serang	Sub.Bidang Perencanaan Permukiman	Dedi Cahyadi	I _{2.1}	<i>Secondary Informan</i>
Kecamatan Kasemen	1. Pendamping RTLH	Khotibi	I _{3.1}	<i>Secondary Informan</i>
	2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Syukur	I _{3.2}	<i>Key Informan</i>
Kelurahan Kasunyatan	Staf	Rosidi	I _{4.1}	<i>Secondary Informan</i>
Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH	1. Kelurahan Kasemen	Rumsiah	I _{5.1}	<i>Secondary Informan</i>
	2. Kelurahan Kasunyatan	Jubaedah	I _{5.2}	<i>Secondary Informan</i>
	3. Kelurahan Kasunyatan	Ine	I _{5.3}	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2018

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick dalam Handoko (2003:11). Dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan manajemen pengelolaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick dalam Handoko (2003:11) yang peneliti jadikan pisau analisis dalam penelitian ini:

1. Perencanaan (*Planning*), adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud/tujuan badan usaha itu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), menetapkan struktur formal dari pada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*), keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. Pembinaan Kerja (*Directing*), tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi.
5. Pengkoordinasian (*Coordinating*), kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan dari pada pekerjaan.
6. Pelaporan (*Reporting*), pimpinan yang bertanggung jawab harus selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. Penganggaran (*Budgeting*), semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha dalam bentuk rencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

4.3.1 *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan merupakan sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman (Hasibuan, 2011:95). Perencanaan ini adalah dinamis dan telah ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Perencanaan dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini sebagaimana telah disampaikan oleh I_{1.1} sebagai berikut :

“Kalo untuk perencanaan program RS-RTLH ini si kita merujuk pada program nasional dari Kementerian Sosial, sebenarnya mah kan ini program pusat Kementerian Sosial. Kita mah istilahnya kepanjangan tangannya saja.”(wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Hal yang senada juga disampaikan oleh I_{1.2}, sebagai berikut:

“Perencanaan RTLH ini sebetulnya program dari pusat merujuk pada program nasional dari Kementerian Sosial kemudian menjadi rujukan ke Dinas Sosial artinya kita kepanjangan tangan dari program nasional jadi pakai sebagai program Dinas Sosial Kota Serang.” (wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh I_{1.1} dan I_{1.2} dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang adalah dengan merujuk pada program nasional yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kota Serang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam menjalankan program RS-RTLH ini.

Program RS-RTLH ini tentunya memiliki suatu mekanisme mulai dari pengajuan awal dari masyarakat sampai dengan pencairan dana yang diberikan

oleh pihak Dinas Sosial kepada masyarakat penerima yang benar-benar memenuhi syarat yang berlaku seperti yang disampaikan oleh I_{1.1}, sebagai berikut:

“Pertamanya itu dari masyarakat sebagai pemohon mengajukan dengan persyaratannya mulai dari KTP, KK, Hak Milik tanah, jadi rumah itu harus milik pribadi ga boleh kalo bukan milik pribadi mah atau tanah sengketa atau juga tanah pemerintah. Setelahnya kita proses terus kita verifikasi lapangan, bener ga nih kaya gini ga rumahnya itu. Kalo memang rumahnya itu sesuai dengan persyaratan, maka kita proses kelanjutannya sampai ke proses pencairan dana. Mungkin seperti itu mekanisme perencanaannya mah.” (wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan pernyataan dari I_{1.1} dapat diketahui bahwa mekanisme dari perencanaan program ini adalah dimulai dari masyarakat sebagai pemohon mengajukan bantuan dengan membawa persyaratan mulai dari KTP, KK, Hak milik tanah, karena tanah yang bukan milik pribadi ataupun tanah sengketa atau juga tanah milik pemerintah tidak bisa diproses untuk mendapat bantuan program RS-RTLH ini. Setelah persyaratan lengkap kemudian ke lapangan untuk diverifikasi. Kemudian jika keadaan di lapangan sesuai dengan yang ada di proposal kemudian data tersebut diproses kelanjutannya sampai ke proses pencairan dana.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh I_{1.2} yang menerangkan bahwa :

“Berdasarkan usulan dari masyarakat, sebagai pemohon mengajukan dengan persyaratannya persyaratan tersebut mulai dari KTP, KK, Hak Milik tanah, jadi tanah itu harus milik pribadi. Tidak boleh hak milik selain pribadi contohnya apakah dia berada di atas tanah perairan pemerintah, maka itu diperlukannya persyaratan yang itu tadi aset tanah milik pribadi. Setelah diusulkan maka ada proses verifikasi lapangan, apakah rumah itu layak kan program ini menyangkut rumah tidak layak huni, kalo memang rumah itu tidak layak untuk dihuni sesuai dengan persyaratan, maka prosesnya boleh dilanjutkan sampai ke proses bantuannya turun. Proses itu juga kan perlu proses yang bertahap, nah karena proses bantuan RTLH ini ada yang diuangkan ada juga yang berupa barang. Kalo yang diuangkan otomatis prosesnya harus masuk ke

BAPPEDA dulu diproses sampe ke proses pencairannya pencairannya harus masuk data-data ke BPKD keuangan daerah terus masuklah ke rekening. Kalo untuk berupa barang otomatis sesuai dengan tahap verifikasi di lapangan dan terus bisa dibantu, maka kita bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi pihak ketiga ini yang membelanjakan.” (wawancara dengan I_{1,2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari perencanaan program ini adalah dimulai dari masyarakat sebagai pemohon mengajukan bantuan dengan membawa persyaratan mulai dari KTP, KK, Hak milik tanah, tanah haruslah milik pribadi bukanlah tanah sengketa atau juga tanah milik pemerintah karena hal itu tidak bisa diproses untuk mendapat bantuan program RS-RTLH ini. Setelah persyaratan lengkap kemudian ke lapangan untuk diverifikasi. Kemudian jika keadaan di lapangan sesuai dengan yang ada di proposal kemudian data tersebut diproses kelanjutannya sampai ke proses pencairan dana. Ada 2 jenis bantuan kepada penerima yaitu bantuan dalam bentuk uang dan ada yang berbentuk barang.

Dalam proses perencanaan tentunya adanya pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan keputusan bersama guna tidak adanya *miss* dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam perencanaan program RS-RTLH ini pihak-pihak yang terlibat itu adalah:

“Yang pasti untuk keterlibatannya dari perencanaan ini saya sebagai Kabid, Kasi yang dibawah saya, ada juga staff-staff kita juga kan punya suatu tim yang mana tim itu fungsinya untuk verifikasi ke lapangan itu, nah dari perencanaannya tentunya kita ngelibatin mereka juga dong” (Wawancara dengan I_{1,1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Hal serupa juga disampaikan oleh I_{1,1}, sebagai berikut:

“Yang terlibat dari perencanaan ini kita punya tim. Tim untuk verifikasi ke lapangan karena memang verifikasi ini adalah syarat mutlak bahwa si penerima ini dicalonkan sebagai yang menerima, jadi harus diverifikasi

dulu. Nah kita ada tim, tim nya itu si pelaksana teknis di lapangan mulai dari Pak Kabid, saya Kepala seksi sampai ke staf.” (wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Dari pihak BAPPEDA khususnya pada sub Bidang Perencanaan Permukiman

(I_{2.1}) yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Pasti terlibat, jadi gini kota itu kan punya mimpi dan tujuan, ingin salah satunya kan Madani, Kota Serang madani. Jadi madani itu kan masyarakatnya mampu hidup mandiri atau segala macam keinginnya itu. Nah di buatlah RPJMD menyesuaikan dengan RPJMN dari pusat, lima tahunan RPJMD itu. Kemudian ada turunannya itu Renstra, rencana strategis. Kemudian baru bisa menurunkan ke Renja, rencana kerja. Misalkan RTLH ini kemudian apa yang mau dikerjakan dari RTLH ini, nah disitu ada dimasing-masing OPD itu. Salah satunya kita di perencanaan perumahan dan permukiman atau perkim, jadi karena RTLH itu ada di dalamnya, mau tidak mau perencanaannya ada di sini. Pastinya kita ikut terlibat pada program ini.” (wawancara dengan I_{2.1} di BAPPEDA Kota Serang, 4 April 2018).

I_{3.1} yang merupakan pendamping dalam program RS-RTLH yang berasal dari pihak Kecamatan Kasemen berpendapat dalam keterlibatannya dalam program ini, sebagai berikut:

“Dari pihak kecamatan kasemen ini terlibat dikarenakan dari proposal itu kan ada mengetahui dari kecamatannya juga. Karena awal mulanya Program RTLH ini kan pertama dari lingkungan, kelurahan, baru ke kecamatan untuk mengetahui, terus ke setelah dari kita, kita dampingi tuh si penerima untuk merekomendasikan ke Dinsos, dilanjutkan ke BAPPEDA kota.” (wawancara dengan I_{3.1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

I_{4.1} sebagai staf kelurahan kasunyatan juga berpendapat sebagai berikut :

“Sebenarnya mah kita dalam perencanaannya mah terlibat ya dari musrembang itu, musrembang kelurahan ya. Di situ kita jelasin bahwa masih banyak di kelurahan Kasunyatan ini yang masih kumuh yang membutuhkan perebahan ini.” (wawancara dengan I_{4.1} di Kelurahan Kasunyatan, 30 April 2018).

Berdasarkan penjelasan dari ke empat informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program RS-RTLH ini adalah tim verifikasi di pihak internal Dinas Sosial itu sendiri. Dari eksternalnya banyak pihak-pihak juga yang terlibat seperti BAPPEDA, Kecamatan, dan juga Kelurahan.

Di dalam suatu program pasti ada yang melatar belakangi dari program tersebut sehingga program tersebut harus dibuat atau diselenggarakan, begitupun dengan program RS-RTLH ini, memiliki latar belakang sehingga program tersebut dibuat. Berikut yang diungkapkan oleh I_{1.1} tentang apa yang melatarbelakangi program rehabilitasi sosial dibuat :

“Yang pertama yaitu di Kota Serang masih banyak sekali lingkungan yang kumuh dan juga masyarakat yang miskin dan ingin memiliki rumah atau hunian yang layak, jadi kita membuat suatu program yang mengacu pada program pusat, atau program kementerian untuk meminimalisir lingkungan kumuh di Kota Serang ini, selain itu juga bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Serang ini.” (wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan keterangan informan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi latar belakang diadakannya program RS-RTLH ini adalah masih banyak terdapat kawasan kumuh yang ada di Kota Serang dan juga masih banyaknya masyarakat miskin yang ingin memiliki rumah atau hunian yang layak untuk di tinggali. Adapun acuan dasar program ini diadakan yang berpacu pada program nasional dari Kementerian Sosial.

Hal serupa disampaikan oleh I_{1.2}, sebagai berikut:

“Ya tadi itu, ini kan program nasional menjadi program daerah, kan kita harus mengusung program yang sudah ada di nasional jadi kita berdayakan menjadi program daerah, semua Dinas baik itu kabupaten

maupun kota itu sudah pasti tentu menjadi program daerah.” (wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Pernyataan senadapun disampaikan juga oleh I_{2.1}, sebagai berikut:

“Pastinya yang melatarbelakanginya itu adalah kemiskinan yang ada di Kota Serang ini. Terutama yang ada di Kecamatan Kasemen ini yang paling besar angkanya. Kemudian juga kumuh, memang ada hubungan sama RTLH, karena kumuh disini salah satu indikatornya adalah rumah tidak layak huni.”(wawancara dengan I_{2.1} di BAPPEDA Kota Serang, 4 April 2018).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan-informan di atas mengenai latar belakang dibuatnya program RS-RTLH ini adalah kemiskinan dan lingkungan yang kumuh. Hal inilah faktor utama yang melatar belakangi dibuatnya program RS-RTLH ini. Program RS-RTLH ini merupakan program Dinas Sosial Kota Serang yang diadaptasi dari program nasional yaitu dari Kementerian Sosial. Program Nasional ini kemudian dilaksanakan di daerah, maka secara otomatis program tersebut menjadi bagian program dari daerah. Maka dari itu latar belakang dibuatnya program inipun tak lepas dari faktor adanya program dari pusat.

Pada dasarnya suatu program memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan program yang baik mengindikasikan bahwa perencanaan program tersebut berjalan dengan baik. Demikian halnya dengan program RS-RTLH memiliki tujuan yang ingin dicapainya, hal ini seperti yang diutarakan oleh I_{1.1}, sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Serang peduli terhadap keadaan ekonomi masyarakat Kota Serang agar masyarakat menempati rumah yang sehat dan aman sehingga sejahtera. Serta mampu mengalokasikan dana lainnya untuk berwirausaha.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Dari Pernyataan I_{1.1} dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai dari program ini yaitu pemerintah Kota Serang menginginkan masyarakat Kota Serang menempati rumah yang sehat dan aman serta dana yang tadinya untuk membangun rumah bisa dialokasikan ke hal yang lain seperti berwirausaha.

Pernyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh I_{1.2} mengenai tujuan yang ingin dicapai dari program ini:

“Yang ingin dicapainya itu yaitu tadi karena ini program bantuan rumah tidak layak huni itu program pengentasan kemiskinan atau penanganan fakir miskin sesuai dengan bidang kita. Kita berharap bisa mengentaskan kemiskinan di Kota Serang ini, ya minimal kita bisa mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Serang ini.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh I_{2.1} yaitu dari BAPPEDA pada Sub Divisi Perencanaan permukiman, Bapak Dedi yaitu sebagai berikut:

“Yang ingin dicapainya itu ingin berkelanjutan pembangunannya itu. Artinya semua orang bisa menikmati hidup yang layak. Karena dalam undang-undangpun menjelaskan bahwa orang miskin itu di pelihara oleh negara.”(wawancara dengan I_{2.1} di BAPPEDA Kota Serang, 4 April 2018).

Selain itu I_{3.1} menyatakan apa yang ingin dicapainya pada program RS-RTLH ini adalah sebagai berikut:

“Yah sebenarnya mah yang ingin dicapainya mah khususnya dari kecamatan kasemen, pengen rata rumah yang yang tidak layak ini jadi layak huni dan tidak kumuh lagi lah.” (wawancara dengan I_{3.1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

Senada dengan apa yang disampaikan I_{3.1}, pernyataan yang disampaikan oleh I_{4.1} sebagai berikut:

“Yang ingin dicapainya si ingin mengurangi tingkat kekumuhan aja, kalo rumahnya sudah dirubah sudah direhab atau juga sudah dirapihkan paling tidak tingkat kesehatan di keluarga itu sendiri dapat meningkat.” (wawancara dengan I_{4.1} di Kelurahan Kasunyatan, 30 April 2018).

Berdasarkan apa yang disampaikan seluruh informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang ingin dicapai dari adanya program RS-RTLH ini adalah Kota Serang menginginkan masyarakatnya menempati rumah yang sehat dan aman sehingga dana yang tadinya untuk membangun rumah bisa dialokasikan ke hal yang lain seperti berwirausaha. Serta dengan adanya program ini juga dapat mengurangi jumlah daerah kumuh yang masih tersebar di wilayah Kota Serang sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pelaksana program agar dapat terlaksana dengan baik. Hal itupun terjadi pada program RS-RTLH ini, dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada program ini tentunya ada usaha-usaha yang dilakukan, seperti apa yang disampaikan oleh I_{1.1}, sebagai berikut:

“Ketika rumah sudah layak, maka beban hidup masyarakat cukup berkurang dan dana bisa dialokasikan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Karena di sisi lain, selain program RS-RTLH yang menjadi program primadona Dinsos juga memiliki program bantuan lain seperti KUBE dalam rangka membantu keadaan ekonomi masyarakat dari segala aspek dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Serang.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan program RS-RTLH ini yaitu disertai dengan memberikan program lain seperti KUBE untuk membantu dalam hal ekonomi. Dengan sudah layaknya rumah yang ditempati tentunya masyarakat tersebut tidak memikirkan lagi untuk masalah membangun rumah, dan fokus ke pemenuhan kebutuhan ekonomi lainnya.

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh I_{1,2} yang menyatakan sebagai berikut:

“Tindakannya yaitu harus mencapai target kita kan menyusun program ini kan dibackup anggaran APBD karena memang ini adalah program dari APBD.” (Wawancara dengan I_{1,2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh I_{1,2} dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan bekerja dengan mencapai target yang direncanakan di awal. Dengan contoh 100 rumah yang ingin direhab, maka dari 100 itu harus direhab semua.

Pendapat juga disampaikan oleh I_{3,1} mengenai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut:

“Itu dilakukan dari Dinas Sosial memberikan dukungan dan uang sebesar duabelas juta lima ratus ya, itu yang di tahun 2016 kalo sekarang lima belas juta, ini kan program rehab rumah ya, dari situ kita minta ke masyarakat untuk minta swadayanya.” (wawancara dengan I_{3,1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

I_{4,1} memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Ya tindakan yang dilakukannya mah kita selalu menyambut baik program-program yang diberikan oleh pemerintah kota, contohnya begini kalo di keluarahan ini mengajukannya seratus rumah yang direhab, terus yang direalisasikannya hanya sepuluh rumah mau ga mau kita terima aja, gitu aja palingan. Itu jugakan masuknya program kita juga kan.” (wawancara dengan I_{4,1} di Kelurahan Kasunyatan, 30 April 2018).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh ke empat informan di atas dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan RS-RTLH adalah rumah warga masyarakat yang memperoleh bantuan menjadi lebih layak huni, dimana kondisi ini secara psikologis akan memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat juga disertakan bantuan lain seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) untuk membantu dalam hal ekonomi. Dengan sudah layak nya rumah yang ditempati tentunya masyarakat tersebut tidak memikirkan lagi untuk masalah membangun rumah, dan lebih fokus ke usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu tujuan lain program inipun dibuat untuk merangsang semangat gotong royong di kalangan masyarakat untuk setidaknya membantu dalam proses perehaban rumah dalam upaya meningkatkan kesadaran sosial masyarakat.

4.3.2 Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah yaitu menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Handoko, 2003:11). Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. Organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Serang dalam mengelola program RS-RTLH ini telah disampaikan oleh I_{1.1} sebagai berikut:

“Untuk pengelompokan pegawai untuk yang mengelola program RS-RTLH ini dibagi ke beberapa kelompok kerja diantara Tim Verifikasi ada dari kita sama ada juga yang dari masyarakatnya, yang dari Dinsos tentunya dari yang di bidang Penanganan Kemiskinan Fakir Miskin ini, kemudian ada TKSK sebagai mitra Dinsos yang dapat SKnya dari Kemensos yang dimana Dinsos disini berfungsi sebagai pembina fungsionalnya, jadi kita yang ngebina si TKSK ini biar pengerjaan Program ini sesuai dengan apa yang Dinsos kerjakan ini.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Sama halnya juga seperti apa yang dikatakan oleh I_{1.2} sebagai berikut:

“Dari pengelompokan kerja di kami Ada pembentukan tim verifikasi lapangan yang langsung di-SK-kan oleh Kepala Dinas yang nantinya bakal memverifikasi ke lapangan, bener gak si kondisi rumahnya kaya gini, sesuai gak si sama yang di foto rumahnya tuh, jadi pembagian kerjanya itu ya tim verifikasi lapangan itu, biar mastiin data yang di ajukan ke kami.”(Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan pernyataan kedua informan dia atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian atau pengelompokan pegawai yang dilakukan Dinas Sosial dengan cara membaginya ke beberapa kelompok kerja diantaranya ada tim verifikasi yang berasal dari pihak Dinas Sosial yang dibantu masyarakat sekitar penerima bantuan. Selain itu ada juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai mitra Dinas Sosial dalam menjalankan program RS-RTLH ini.

Dalam kepengurusan program RS-RTLH ini selain dari internal Dinas Sosial ada juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepengurusan program ini seperti dari BAPPEDA, pendamping dari pihak kecamatan, dan juga dari TKSK setiap kecamatan yang ada di Kota Serang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh I_{1.1}, sebagai berikut:

“Ya kalo untuk yang terlibat di kepengurusannya mah pertama dari kita dulu nih dari Kepala Dinas tentunya terus ada saya Kepala Bidang terus juga Kasi, dan staff-staffnya juga, itu dari internalnya kita ya. Kalo dari eksternalnya kita libatin tentunya BAPPEDA, ada juga dari kecamatan yang jadi pendamping, terus kita juga libatin TKSK juga.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Hal lain disampaikan oleh I_{1.2}, sebagai berikut:

“Nah disini yang terlibat terutama pengguna anggaran, pengguna anggaran itu kan kepala dinas langsung. Karena uang turun dari keuangan daerah turun ke dinas, berarti penanggung jawabnya adalah kepala dinas. Kemudian sampai lah ke kita disini.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Pendapat kedua informan juga dibenarkan oleh I_{2.1}, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Seperti yang saya jelaskan tadi kita juga terlibat dari kepengurusan program ini. Kan dari masing-masing OPD memiliki Renja tadi masalah dari RTLH juga kan masuk ke perencanaan bidang ini, di perencanaan dan permukiman ini.” (wawancara dengan I_{2.1} di BAPPEDA Kota Serang, 4 April 2018).

I_{3.1} membenarkan bahwa pihak kecamatan ikut terlibat dalam kepengurusan program RS-RTLH ini, seperti apa yang disampaikannya sebagai berikut:

“Sebenarnya mah ikut terlibat dikarenakan yang pertama datangnya barang otomtisikan kita terlibat, pendamping itu. Nah kan pendamping itu kan dari kecamatan diambilnya, jadi kita terlibat.” (wawancara dengan I_{3.1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

I_{3.2} membenarkan bahwa pihak TKSK juga ikut terlibat dalam kepengurusan program RS-RTLH ini,

“Awalnya kan ada pengajuan proposal tuh dari masyarakat melalui kami, saya juga sebagai tim verifikasi lapangan yang nanti ke lapangan buat survei, setelah nantinya pengajuan itu di acc oleh pihak dinsos, saya nemenin warga yang dapet bantuan itu untuk pengambilan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-. Disini juga kita dibantu orang-orang dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, TKSK yang masing-masing ngirim perwakilannya.” (Wawancara dengan I_{3.2} di Kantor Kelurahan Terumbu 30 April 2018)

Berdasarkan penjelasan dari keseluruhan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kepengurusan program RS-RTLH ini selain dari internal pihak Dinas Sosial, kepengurusan program inipun melibatkan BAPPEDA, dan juga pendamping dari Kecamatan yang ada di Kota Serang yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping yang terdiri dari warga masyarakat yang bersedia menjadi relawan untuk mendampingi sejak proses awal hingga akhir program.

4.3.3 *Staffing* (Penyusunan Pegawai)

Penyusunan pegawai adalah keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Dalam penyusunan pegawai ini juga mempunyai indikator diantaranya yaitu penempatan pegawai sesuai dengan ahlinya yang berarti yaitu melengkapkan fungsi pekerjaan dengan pegawai yang mempunyai ahli di bidangnya. Berikut pernyataan yang dipaparkan oleh I_{1.1} sebagai berikut:

“Sudah, sesuai dengan tupoksinya masing-masing kan sudah ada pembinaan sebelumnya kan dari kami baik untuk kami sendiri maupun bagi TKSK jadi semuanya nantinya tau bagaimana tupoksinya masing-masing. Dan SDM dari kami pun udah terbilang mumpuni ya, bisa dibilang begitu ya karena mereka pertama melek IT nah terutama juga buat yang verifikasi nih, diwajibkan melek IT. Dasarnya si memiliki kesadaran, tanggung jawab penuh buat tugas dia yang dibebankan ke mereka. Dari bidang Penanganan Fakir Miskin ini sendiri ada 3 orang Kepala Seksie, yang lulusan S2 ada 2 orang dan S1 ada 1 orang, serta dibantu oleh staf dan tenaga magang yang kesemuanya adalah S1. Jadi kalo dibilang sesuai atau enggaknya pada tupoksinya, sudah sesuai.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh I_{1.1}, dapat kita ketahui bahwa penempatan pegawai dalam program RS-RTLH ini telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena telah mendapat pembinaan terkait program RS-RTLH sebelumnya. SDM yang dimiliki Dinas Sosial juga terbilang mumpuni karena sudah mengetahui IT dan juga memiliki tanggung jawab penuh dalam

setiap pekerjaannya. Dari bidang Penanganan Fakir Miskin ini memiliki 3 orang Kepala Seksi, dari lulusan S2 ada 2 orang dan S1 ada 1 orang, serta dibantu oleh staf dan tenaga magang yang kesemuanya adalah S1. Bisa dikatakan SDM yang ada telah mempunyai pendidikan yang mumpuni, serta memahami tupoksinya.

Senada dengan pernyataan diatas, pernyataan oleh I_{1.2} sebagai berikut:

“Nah, kan disini kita ada pembinaan ni buat para pegawai yang di program RS-RTLH ini nah sebelumnya diadain pembinaan, pelatihan gitu, abis itu udah baru di adain pengelompokkan tugas-tugas pegawai terkait program RS-RTLH disesuaikan dengan tingkat pemahaman dalam kaitannya dengan program RS-RTLH ini, jadi si pegawai paham ke bagian apa nih, baru deh di tempatin di situ.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Penyataan di atas juga diperkuat oleh pendapat I_{3.2} yang merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kasemen, sebagai berikut:

“Kalo buat kita mah kalo ditanya sesuai atau ngga nya si, sesuai karena kita kan udah di kasih pelatihan pembinaan tuh, jadi kita sedikit banyaknya tau gimana kerjaan kita. Malah nih ya saat pengejaan perehaban itu kita sama warga ikut gotong royong sama-sama kerja gitu.”(Wawancara dengan I_{3.2} di Kantor Kelurahan Terumbu 30 April 2018).

Dari pernyataan keseluruhan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai dalam pengelolaan program RS-RTLH yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini dikarenakan sebelum terjun ke lapangan para pegawai dibina dan diberi pelatihan terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, strategi dan pengetahuan kepada pegawai untuk tidak salah dalam pekerjaannya. Sehingga Dinas Sosial Kota Serang dapat dikatakan telah mempunyai SDM yang mumpuni dikarenakan setiap pegawai telah mengetahui tupoksinya masing-masing.

Untuk mengefektifkan setiap pekerjaan yang dilakukan dibutuhkan jumlah pegawai yang memadai. Sama halnya di dalam program RS-RTLH ini pegawai yang ada haruslah memadai dan sesuai dengan kebutuhan guna mengefektifkan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini I_{1.1} berpendapat sebagai berikut:

“Menurut saya sih sudah cukup kan kita juga kan ada kasi-kasi dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi kita punya tim verifikasi yang dari luar juga kan ikut terlibat dalam kepengurusan mulai dari pendamping dari kecamatan ada juga TKSK, dan dari masyarakat juga ada yang di dalam tim verifikasi itu.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Senada dengan pernyataan di atas I_{1.2} juga berpendapat:

“Dari mulai kepala bidang aja, kasi tiga orang di sini tetapi yang khususnya menangani program ini cuma satu kasi saja. Namun disini kita bekerja team work karena kalo tidak begitu kita ga bisa berjalan ini program.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada di dalam program RS-RTLH ini sudah memadai dan sudah cukup. Pelatihan dan pembinaanpun telah diberikan dalam rangka memberikan pemahaman yang tepat kepada pegawai dalam melaksanakan program. Dalam kepengurusan ini juga melibatkan Kasi yang khusus menangani program ini dan dibantu oleh tim verifikasi yang terdiri atas pegawai internal Dinas Sosial dan juga dari masyarakat berupa TKSK dan ada pendamping dari pihak Kecamatan.

4.3.4 Directing (Pembinaan Kerja)

Pembinaan kerja adalah tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi. Selain itu

pula, pembinaan kerja merupakan mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Pembinaan kerja dinilai menjadi aspek yang sangat penting dalam terwujudnya tujuan dari program ini agar tugas yang dikerjakan oleh seluruh pegawai yang berada di Bidang Penanganan Fakir Miskin dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan uraian tugasnya, pembinaan yang diberikan juga harus pembinaan yang menjurus kearah program sehingga pegawai yang terlibat di dalam program tersebut paham dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh I_{1.1} mengenai pembinaan kerja yaitu, sebagai berikut :

“Yang namanya pembinaan itu kan penting soalnya kan itu buat pegawai itu juga biar gada kesalahan dikerjaannya. Kalo ditanya ada ga sih pembinaan kepada pegawai kita? Ya jawabannya tentu ada, dan pasti ada. Bukan ke pegawainya doang kan, si penerima juga kan dapet pembinaan biar tahu pertanggung jawabannya. Pembinaannya itu sendiri ya Pertama disosialisasikan tuh melalui undangan ke pegawai-pegawai, terus kumpul, briefing, terusnya diberi penjelasan secara detail mengenai program RS-RTLH ini.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Hal senda juga disampaikan oleh I_{1.2}, yang menyatakan:

“Tentu ada pembinaannya, pelatihan gitu lah buat pegawainya. Pelatihan pembinaan itu diadainnya berupa bimbingan teknis sama rapat kedinasan di internal Dinsos itu sendiri. Di pembinaan itu kan kita ngebagi-bagi tuh mana yang kerja ini, dibina yang kaya gini, dibina kaya gitu pelatihannya kaya gitu biar ga melenceng gitu pas kerjanya.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Pernyataan di atas dibenarkan oleh I_{3.1}, yang menyebutkan:

“Untuk pembinaan ini semua pendamping dari setiap kecamatan di Kota Serang yang mana ada 6 kecamatan dikumpulkan pendamping yang 6 kecamatan tuh, jadi ada 6 orang. Nah terus disosialisasikan oleh pihak Dinsos bahwa pendamping harus menjelaskan mekanisme untuk RTLH ini

sesuai dengan arahan.” (wawancara dengan I_{3,1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

I_{4,1} juga memberikan pendapatnya mengenai pembinaan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial terkait program RS-RTLH ini:

“Kalo pembinaan itu sendiri dari pihak Dinsos ke kelurahan mah kalo secara khusus mah ngga ada ya, cuma ada secara umumnya aja dibahas ya contohnya ngasih sosialisai-sosialisasi kepada kelurahan.” (wawancara dengan I_{4,1} di Kelurahan Kasunyatan, 30 April 2018).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh kesemua informan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang melakukan pembinaan kerja dalam proses pelaksanaan program RS-RTLH ini hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman antar pegawai dan juga agar dalam pengerjaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Pembinaan itu sendiri diberikan kepada para pegawai internal Dinas Sosial dan juga para pendamping-pendamping yang terdiri dari relawan serta dari pihak Kecamatan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menselaraskan dalam pengerjaan program RS-RTLH ini. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada para karyawannya saja melainkan diberikan juga kepada penerima bantuan. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rumsiah yang merupakan penerima bantuan program RS-RTLH ini (I_{5,1}), sebagai berikut:

“Ada bimtek gitu jadi kita dijelasin sama mereka bantuan ini tuh kaya gimana gitu pokonya terus diarahin juga harus gimana, ya pokoknya mah gitu lah.” (wawancara dengan I_{5,1} di Kelurahan Kasemen, 30 April 2018).

Ibu Jubaedah sebagai penerima bantuan juga berpendapat (I_{5,2}) , sebagai berikut:

“Ada kaya dikumpulin gitu banyakan dari kelurahan mana-mana juga dikumpulin, kita dikasih tau gitu bantuan ini tuh seperti apa, kaya sosialisasi gitu deh pokoknya mah.” (wawancara dengan I_{5,2} di Link. Kroya Indah Rt 2 RW 8, 30 April 2018).

Serta ada juga Ibu Ine yang merupakan penerima bantuan juga berpendapat (I5.3), sebagai berikut:

“Ada kaya pengarahannya gitu. Waktu itu kita disuruh ke kantornya, diarahin suruh bikin rekening terus dikasih tau kalo uang yang dikasih tuh ini cuma ngerehab bukan ngebangun rumah.” (wawancara dengan I5.3 di Link. Kroya Indah Rt 2 RW 8, 30 April 2018).

Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan di atas yang merupakan penerima bantuan program RS-RTLH ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang memberikan pembinaan kepada para penerima bantuan berupa bimtek, pengarahannya, dan lain-lainnya dalam untuk memberikan pemahaman yang memadai.

4.3.5 Coordinating (Pengkoordinasian)

Pengkoordinasian adalah kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan daripada pekerjaan. Selain itu, koordinasi juga merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam dimensi pengkoordinasian ini terdapat beberapa indikator yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Indikator itu diantaranya ada koordinasi tiap lembaga dan koordinasi tiap bagian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam program RS-RTLH. Koordinasi tiap lembaga merupakan kegiatan pekerjaan antar tiap lembaga atau dinas yang terkait. Manajemen pengelolaan bisa tercapai dengan tujuan jika dalam koordinasinya juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam program RS-RTLH ini Dinas Sosial Kota

Serang bekerjasama dengan beberapa SKPD lain seperti yang dipaparkan oleh I_{1.1} yaitu sebagai berikut:

“Selama ini berjalan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti TKSK, ketua RT/RW berjalan dengan baik, karena dari awal pelaksanaan, dalam prosesnya selalu kita selalu ngelibatin semuanya dilibatinnya hingga akhir dari tahapan-tahapan program itu. Kami selalu jalan beriringan nih dalam pengelolaan program RS-RTLH ini karena sudah paham akan jobdesk nya masing-masing yang kita tinggal saling mengisi satu sama lainnya.”(Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Pernyataan di atas senada dengan apa yang di utarakan oleh I_{1.2} :

“Kita selalu koordinasi, melalui rapat-rapat, bimbingan teknis mengenai program RS-RTLH ini dengan cara kita mengundang pihak-pihak terkait seperti Camat, Lurah, Lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Serang dan dengan masyarakat itu sendiri.”(Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari I_{2.1}, yang menyatakan:

“Jadi Bappeda itu sebagai koordinator fungsinya, yang mengkoordinasikan semua OPD. Misalkan kita ambil kegiatan RTLH, kami Bappeda itu membuat perencanaan profil umum, jadi ini mau diapain ini Kota Serang ini, dibuatlah profil kumuh. Bappeda sebagai koordinasinya, mengkoordinasikan, memanggil semua OPD, jadi kita kasih uang yang tadi itu, disini kita bukan membagi-bagi uang ya. Harus ada juga di Renja RTLH itu, jadi kalau tidak ada di Renjanya uang buat RTLH itupun tidak kami berikan ke OPD tersebut.”(wawancara dengan I_{2.1} di BAPPEDA Kota Serang, 4 April 2018).

I_{3.1} membenarkan pernyataan dari I_{1.1} yang menyatakan:

“Alhamdulillah Dinsos bersinergi dengan kecamatan khususnya dengan kecamatan Kasemen dan ini perlu untuk menjalin kerjasama. Jadi kalo tidak ada kecamatan mana mungkin Dinsos tau rumah yang tidak layak huni itu dimana-mana nya, seperti itu.”(wawancara dengan I_{3.1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

I_{3.2} yang merupakan TKSK Kecamatan Kasemen juga membenarkan pernyataan dari I_{1.1}, yang menyatakan:

“Untuk koordinasi itu sendiri kita ada laporan ke Dinsos, kita laporan bahwa ada rumah yang butuh direhab nih. terus kita samperin buat disurvei, abis itu kita laporkan buat direkomendasiin ke atasnya. Ya kaya gitu juga kan karena ga lepas dari koordinasi sama RT/RW nya. Alhamdulillahnya Lancar sih koordinasinya, sama Dinsos juga. Sudah baik, Cuma dulu tuh masih sering terjadi kecolongan karena kadang tau-tau masyarakat gak laporan lagi eh tau-tau udah dapet aja. Tapi sejak itu udah langsung diperbaiki si. Makanya sekarang ini kalo gada stempel saya (TKSK) proposal apapun yang diajuin masyarakat ga akan diterima sama Dinsosnya.” (Wawancara dengan I3.2 di Kantor Kelurahan Terumbu 30 April 2018).

I4.1 yang merupakan pihak dari Kelurahan Kasunyatan juga berpendapat mengenai koordinasi yang dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kota Serang dalam program RS-RTLH ini, sebagai berikut:

“Kalo koordinasi kita dengan pihak Dinsos cuma sebatas individu saja, kalo pihak kelurahan lebih banyak ke si penerima manfaatnya saja sering melihat memantau, kalo ikut campur terlalu jauh kan gak bisa ada pendamping juga kan, ada wewenangnya juga.” (Wawancara dengan I4.1 di Kantor Kelurahan Kasunyatan 30 April 2018).

Berdasarkan penjelasan dari ke semua informan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang melakukan koordinasi dengan pihak BAPPEDA, pihak Kecamatan yang diwakili oleh pendamping di setiap Kecamatan, selain itu juga ada TKSK, pihak Kelurahan, RT/RW setempat, dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait dengan program RS-RTLH ini. Koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif, rapat-rapat, serta bimbingan teknis mengenai program RS-RTLH ini dengan cara kita mengundang pihak-pihak terkait seperti Camat, Lurah, Lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Serang dan dengan masyarakat itu sendiri.

4.3.6 Reporting (Pelaporan)

Reporting merupakan pimpinan yang bertanggung jawab harus selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi. Pelaporan juga merupakan manajemen yang berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Bentuk laporan yang ada di Dinas Sosial Kota Serang dalam program RS-RTLH ini merupakan laporan setiap kegiatan yang sudah dilakukan yang dilaporkan perbulannya, laporan tersebut berupa catatan apa saja yang dilakukan dalam sebulan dan dilaporkan ke kepala bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Serang untuk dilaporkan ke Kepala Dinas seperti yang diungkapkan oleh I_{1.1} yaitu, sebagai berikut :

“Kalo pelaporan ada, dan tentunya selama ini berjalan dengan baik. Biasanya laporan itu minimal dari sejak prosesnya masih 0%, kemudian 50% hingga akhirnya yaitu 100%, laporan itu berupa laporan tertulis dalam lembaran serta nota-nota bukti transaksi dan dokumentasi dalam bentuk foto. Nanti warga ngirim foto ke kita bangunan rumahnya gimana? Apa bener yang di bangunnya sesuai foto yang di awal itu. Tetapi selama ini berjalan cukup baik pelaporan warganya ke kita dan belum ada persoalan terkait laporan itu.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Sama halnya dengan pernyataan di atas, I_{1.2} juga menyatakan:

“Kalo laporan di kita tuh gini ya, setelah dilakukan verifikasi di tahap awal kaya permohonan gitu tuh, nah terus kita akan adain monitoring dan evaluasi atau monev, itu dilakuin selama proses pelaksanaan bantuan sebagai bahan pelaporan. Dari bentuk laporannya itu tertulis dan dokumentasi berkas belanja barang, notanya kita minta sama terusnya foto tahap awal proses yaitu dari 0%, terus pas 50% nya, terus yang

terakhir pas 100% nya. Minimal laporannya ada 3 tahapan itu pokoknya.”(Wawancara dengan I_{1,2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

I_{3,1} yang merupakan pendamping dari pihak kecamatan membenarkan pernyataan kedua informan di atas, berikut pernyataannya:

“Dari datangnya uang dari pemerintah kota kita langsung belanja ke material beli apa aja yang dibutuhin, terus mulai awal pembangunan, terus pertengahan sampai selesai, nah baru kita bikin LPJ, dari awal no persen kita foto terus pertengahannya lima puluh persen juga kita foto, sampai sudah selesai baru kita bikin LPJ buat pertanggung jawabannya.”(wawancara dengan I_{3,1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh semua informan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan dilakukan oleh penerima bantuan kepada Dinas Sosial itu saat awal dari 0%, 50%, dan 100%. Kemudian ketika pengerjaan perehaban rumah telah selesai barulah dibuat LPJ (lembar pertanggung jawaban) oleh masyarakat yang dibantu oleh pendamping maupun TKSK agar laporan yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Laporan tidak hanya dilakukan oleh individu (penerima) kepada lembaga (Dinas Sosial) saja, melainkan tiap lembaga juga memberikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait, baik di internal maupun eksternal yang mana hal demikian merupakan bentuk pertanggung jawaban dari hasil program RS-RTLH ini. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh I_{1,1}, sebagai berikut:

“Untuk laporan kita selalu ada monev, di monev ini kita tinjau nih kekurangannya apa aja yang harus dilakuin apa aja buat kedepannya. Terus juga kan kita ada SPJ buat pertanggung jawaban si dana ini kemana nih, kita masukin semuanya di SPJ.”(Wawancara dengan I_{1,1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh I_{1,2}, sebagai berikut:

“Kalau laporan untuk verifikasi di lapangan itu kita ada administrasi monev, monitoring evaluasi. Kalo sudah sampai bantuan itu ke si penerima, sudah tahap selesai seratus persen tuntas terealisasi, itu biasanya kita suka meninjau. Nah disitulah ketika kita sudah meninjau kita kan membawa berkas administrasi monev dalam formatnya. Itulah yang menjadikan laporan kita, tindak lanjut atau feedback dari program itu. Kita juga ada SPJ ada pelaporan penggunaan anggaran terkait dengan anggaran tahapan pertama sosialisasinya sampai ke teknisnya di lapangan itulah yang disebut laporan untuk kita, itu aja sebatas itu pelaporannya.”(Wawancara dengan I_{1,2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

I_{2.1} juga berpendapat sebagai berikut:

“Kalau untuk laporan mah adanya di masing-masing OPD, terus kemudian melaporkan ke Bappeda tiap bulannya, melalui yang namanya itu SIPD, sistem informasi. Jadi dari masing-masing OPD itu masuk ke data kita ada di bidang P2EP itu.”(wawancara dengan I_{2.1} di BAPPEDA Kota Serang, 4 April 2018).

I_{3.1} juga berpendapat mengenai laporan pihak kecamatan Kasemen kepada

Dinas Sosial, sebagai berikut:

“Pihak kecamatan Kasemen melaporkan ke Dinas Sosial terkait rumah tidak layak huni di kecamatan ini nih berapa-berapanya kita kirim data tersebut ke Dinas Sosial, misalkan di kecamatan Kasemen ini ada dua puluh unit rumah yang tidak layak, nah baru kita rekomendasikan rumah yang tidak layak tersebut dan kemudian kita laporkan ke pihak Dinas Sosial.”(Wawancara dengan I_{3.1} di Kecamatan Kasemen, 30 April 2018).

Berdasarkan penjelasan dari ke empat informan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan yang dilakukan Dinas Sosial itu berupa monitoring evaluasi untuk di internal Dinas Sosial. Selain itu Dinas Sosial juga membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana-dana yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial selaku penyelenggara program yang mana sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Fungsi BAPPEDA ialah menyediakan Sistem informasi Perangkat Daerah (SIPD) untuk instansi-instansi yang akan memberikan laporannya. Sedangkan pihak

Kecamatan dan Kelurahan Kasemen hanya sekedar melaporkan tentang bagaimana kondisi dan juga jumlah rumah yang tidak layak huni di kecamatan Kasemen.

4.3.7 Budgeting (Penganggaran)

Penganggaran merupakan pembiayaan dalam bentuk rencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran. Penganggaran pula bisa diartikan sebagai suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh.

Rencana anggaran anggaran merupakan anggaran tambahan yang dirasa untuk mencukupi kebutuhan program, rencana anggaran dirasa sangat dibutuhkan bilamana anggaran yang diberikan tidak mencukupi atau sangat minim, berikut juga yang dipaparkan oleh I_{1.1} yaitu sebagai berikut:

“Kalo untuk anggaran kita Dinas Sosial sudah merencanakannya dari sejak satu tahun sebelumnya kaya tadi perencanaan awal saja kan, kita menerima permohonan, baru setelah pengajuan kita ke pusat sudah beres tinggal nunggu acc dari atasnya baru tuh dianggarkan. Untuk tahun ini anggaran hanya dari Kas Daerah saja, emang si kalo dibilang cukup mah saya rasa sih kurang, ya namanya juga uang dan jika dibandingkan dengan harga material sekarang. Tapi ya balik lagi ke kemampuan Kas Daerah, oleh karena itu diberi pemahaman kepada msyarakat agar melakukan perehaban sesuai prioritas sehingga pintar-pintar mereka mengelola uang tersebut sekaligus memberi stimulasi kepada tetangga-tetangganya agar mau membantu, ya swadaya masyarakatnya lah gitu.”
(Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan apa yang dijelaskan informan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dilakukan dari tahun sebelumnya. Setelah itu pihak Dinas Sosial Kota Kota Serang

mengajukannya ke pemerintah pusat untuk menunggu persetujuan. Setelah mendapat persetujuan baru kemudian anggarannya pun dicairkan.

Dari perencanaan anggaran tersebut ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Sosial, hal ini seperti apa yang disampaikan oleh I_{1,2}:

“Perencanaan anggarannya kita dari awal menyusun dari kepala seksinya kitanya dulu menyusun RKA, rencana kegiatan anggaran. Setiap tahunnya kan kasi memiliki tugas secara teknis, kan itu ada di kasi juga kan, kepala seksi yang buat teknisnya dari program itu. Maka si kepala seksi harus menyusun rencana kegiatan anggaran, pertahun ini murni berapa misalkan bahan berapa, berapa puluh, berapa ratus, berapa juta, berapa milyar disusun. Nah ketika rencana sudah buat maka adanya asistensi yaitu pemeriksaan dari keuangan daerah dari Bappeda, dan dari tim-tim pemeriksa penyusunan anggarannya, ada timnya. Nah setelah itu, setelah di periksa dan telah jadi maka jadilah DIPA, dokumen penganggaran anggaran. Kalo sudah jadi DIPA maka sudah harus itu yang dipakai.”(Wawancara dengan I_{1,2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dimulai dari kepala seksi menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA). Kepala seksi ini membuat perhitungan terhadap anggaran yang nantinya akan diberikan kepada penerima bantuan dengan melihat kondisi harga bahan bangunan yang ada dipasaran pada tahun berjalan. Setelah itu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah maupun dari BAPPEDA. Setelah itu jadilah sebuah dokumen anggaran yang nantinya harus dipakai pada program RS-RTLH ini.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu program, sehatnya anggaran akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan dari program tersebut. Sama halnya dengan program RS-RTLH, anggaran yang diberikan kepada penerima bantuan dalam program ini dirasa belum mencukupi untuk

proses perehaban rumah. Pada kenyataannya masyarakat penerima bantuan justru meninggalkan hutang pasca proses perehaban rumahnya tersebut. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh I_{5.1}, sebagai berikut:

“Kalo menurut saya si kurang, jadi kita perbaiki yang penting-pentingnya aja dulu, nah itupun kekurangannya kita yang nyari uangnya, nyari pinjaman kesana-sini.”(wawancara dengan I_{5.1} di Kelurahan Kasemen, 30 April 2018).

Sama halnya seperti pernyataan di atas, I_{5.2} juga menyatakan:

“Ya belum cukup ya kalo bisa dibilang mah, sisanya dari sendiri. Kita nekat aja, ya gimana kalo ga diterusin banjirin terus ini rumahnya, ini juga saya minta bantuan ke sodara-sodara, pinjem ke tetangga-tetangga. Ya gimana ya ibu mau ngebangun ga ada duitnya, mau ga dibangun rumah banjirin melulu, ya nekat ajalah nanti juga ada jalannya mah, bismillah aja lah waktu itu ibu mah.”(wawancara dengan I_{5.2} di Link. Kroya Indah Rt 2 RW 8, 30 April 2018).

I_{5.3} memberikan pernyataan yang sama seperti pernyataan di atas, sebagai berikut:

“Nggak cukup, mangkanya ini sepotong doang belakangnya belum. Kurang uangnya. Ini juga dibantu ama uang sendiri. Kalo ga dibantu uang sendiri mah ini ga cukup. Ini juga saya masih punya utang bekas ngebangunnya.”(wawancara dengan I_{5.3} di Link. Kroya Indah Rt 2 RW 8, 30 April 2018).

Berdasarkan ketiga informan di atas yang merupakan penerima bantuan program RS-RTLH dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk biaya perehaban masih belum mencukupi sehingga para penerima menggunakan uang sendiri untuk menutupi kekurangannya. Bahkan sampai terjadi kasus dimana penerima bantuan ini meminta sumbangan dari sanak saudaranya, selain itu merekapun meminjam uang kesana kemari untuk menutupi kekurangannya sehingga meninggalkan banyak hutang setelah proses perehaban ini selesai.

Dari pihak Dinas Sosial Kota Serangpun menerangkan bahwa terkait jumlah anggaran yang diberikan kepada penerima itu sudah dihitung sesuai dengan kemampuan dari APBD Kota Serang itu sendiri, dan juga berpedoman pada petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh I_{1.1}, sebagai berikut:

“Kalo anggaran itukan dari APBD kita ga bisa sembarangan ngasih dua puluh juta misalkan atau berapa gitu. Itu kan dilihat juga dari kekuatan dari APBD Kota Serang juga. Ada juga kan program Kementerian Sosial dari Kemensos itu sendiri kan lima belas juta deh kalo gak salah, nah masa kita ngelebin itu, gak mungkin juga kan.”(Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Senada dengan pernyataan di atas, I_{1.2} juga menyatakan:

“Jadi gini, kita memberikan anggaran itu sesuai dengan merujuk kepada program nasional dulu, program nasional berapa sih, program dari kementerian aja ngasih cuma lima belas, kita kan kepanjangan tangan, maka kita merujuknya kesana ke program nasional itu, memang karena ada dasarnya. Kenapa kita menganggarkannya dua belas juta lima ratus ribu karena kan ada pedomanya, pedoman umum tentang teknis bantuan RTLH dari Kemensos. Selain itu juga kita menyesuaikan dengan harga barang pada tahun tersebut.”(Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan yang merupakan pihak dari Dinas Sosial Kota Serang dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran yang diberikan pihak Dinas Sosial kepada penerima bantuan itu telah dihitung dengan melihat pada kekuatan dari APBD Kota Serang itu sendiri, dan juga melihat pada petunjuk teknis yang ada di program Kementerian Sosial. Anggaran yang diberikan juga merupakan hasil dari perhitungan dengan menyesuaikan harga barang pada tahun yang sedang berjalan.

Dalam penganggaran ini juga terdapat indikator mengenai pengawasan penggunaan anggaran yang merupakan wewenang lembaga atau bidang yang

mengawasi pengeluaran dari kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pengawasan anggaran dalam program RS-RTLH yaitu monitoring dana untuk perehaban yang diberikan oleh Dinas Sosial langsung melalui rekening para penerima bantuan program ini. Hal tersebut diungkapkan oleh I_{1.1} yaitu sebagai berikut :

“Dari awal pencairan dana juga sudah kita awasi, ada dari tim kita datang langsung kesana buat ngawasin dari pengerjaannya atau juga danannya kemana aja. Nah itu juga nantinya buat laporan kita juga di SPJ.” (Wawancara dengan I_{1.1} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Seperti yang dijelaskan oleh I_{1.1} bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada penerima bantuan dimulai dari awal pencairan dana, kemudian pada proses perehaban rumahnya, sampai ke penggunaan anggaran yang dilakukan oleh para penerima bantuan.

I_{1.2} juga berpendapat, sebagai berikut :

“Nah yang tadi itu misalkan ada pelaporan dari masyarakat dari nol persen rumahnya kita awasi pun sampai dengan udah jadi udah seratus persennya kita awasi sampai pelaporan akhirnya yang harus melaporkan yang sudah dibelanjakannya.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Dari penjelasan I_{1.2} dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial mulai dari rumah yang masih 0% pengerjaannya, 50%, sampai ke tahap sudah selesai atau sudah jadi 100%. Pengawasan juga dilakukan sampai proses pelaporan akhir dari masyarakat untuk anggaran yang sudah dibelanjakannya.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh I_{5.1} yang merupakan penerima bantuan yang menyatakan:

“Iya ada tuh yang ngontrol, dapet berapa hari tuh baru ada yang ngontrol, kalo di itung mulai dari pembangunan mah ada dua kali mah orang dinsos itu ngontrol. Dari proses pembangunannya sama pas beres,

karena mungkin pengen liat prosesnya kali”(wawancara dengan I_{5.1} di Kelurahan Kasemen, 30 April 2018).

Hal senada juga diutarakan oleh I_{5.2}, sebagai berikut:

“Ada waktu itu ada yang ngontrol pas ngebangunnya ada datang kesini, foto rumah yang pas lagi ngebangunnya. Dateng kesini kayanya mah ada dua kali datang kesini.”(wawancara dengan I_{5.2} di Link. Kroya Indah Rt 2 RW 8, 30 April 2018).

I_{5.3} juga memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“Waktu itu ada yang ngontrol pas waktu pembangunannya dua orang, foto-fotoin rumah yang lagi dibangun. Kesininya dua kali kaya mah pas lagi hari keberapa gitu pas ngebangunnya sama pas udah mau beres baru dateng lagi.” (wawancara dengan I_{5.3} di Link. Kroya Indah Rt 2 RW 8, 30 April 2018).

Dari pernyataan para penerima bantuan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial melakukan pengawasan kepada para penerima bantuan program RS-RTLH ini. Berdasarkan penjelasan para informan pihak Dinas Sosial melakukannya dua kali pada saat proses pembangunan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh dua orang. Pengawas tersebut datang dan mengambil foto dari rumah yang sedang direhab untuk dijadikan laporan oleh pengawas tersebut.

Pengawasan anggaran ini juga dilakukan oleh antar lembaga yang bersangkutan, agar dana yang telah dicairkan kepada pihak penyelenggara (Dinas Sosial) dapat tersalurkan dengan baik dan tidak menyimpang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh I_{1.1}, sebagai berikut:

“Tentu ada pengawasannya, itukan dana APBD yang kita laksanakan pasti diawasi setiap alokasinya yang kita lakukan buat dana tersebut. Yang ngawasnya itu dari pihak keuangan daerah.” (Wawancara dengan I_{1.2} di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Senada dengan pernyataan di atas, I_{1.2} juga berpendapat:

“Pengawasnya pasti ada, namanya uang negara uang pemerintah. Kitakan hanya pelaksana, melaksanakan anggaran itu. Melaksanakan dana tersebut supaya sampai ke si penerima, penerima itu sasaran, itu dilakukan oleh Inspektorat Kota Serang.” (Wawancara dengan I1.2 di Dinas Sosial Kota Serang, 5 April 2018).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan tersebut, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan lembaga terkait anggaran yang ada dilakukan oleh pihak Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota Serang. Dinas Sosial hanya menjadi pelaksana anggaran tersebut untuk sampai kepada para penerima bantuan program RS-RTLH ini.

4.4. Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai fungsi-fungsi manajemen.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen menurut Luther Gullick menurut Handoko (2003:11) yang meliputi 1) *Planning*, 2) *Organizing*, 3) *Staffing*, 4) *Directing*, 5) *Coordinating* dan 6) *Reporting*, 7) *Budgeting*.

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu pengelolaan dimana perencanaan ini sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan suatu program. Dalam program RS-RTLH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang ini perencanaan yang dilakukan dengan merujuk pada program nasional yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kota Serang merupakan

kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam menjalankan program RS-RTLH ini. Yang berarti dalam program RS-RTLH ini Dinas Sosial Kota Serang hanya menjalankan program yang diadakan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Sosial, yang didalam program tersebut Dinas Sosial hanya melakukan sedikit perubahan terhadap perencanaan atau prosedur yang ada di dalam program nasional ini dan menyesuaikannya dengan kondisi Kota Serang.

Dalam perencanaan pihak Dinas Sosial Kota membuat suatu mekanisme untuk para penerima agar bisa mendapatkan bantuan program RS-RTLH ini. Mekanisme dari program ini dimulai dari masyarakat sebagai pemohon mengajukan bantuan dengan membawa persyaratan mulai dari KTP, KK, Hak milik tanah. Dalam hal ini tanah haruslah milik pribadi bukanlah tanah sengketa atau juga tanah milik pemerintah karena hal itu tidak bisa diproses untuk mendapat bantuan program RS-RTLH ini. Setelah persyaratan lengkap kemudian ke pihak Dinas Sosial datang ke lapangan untuk diverifikasi, untuk membuktikan apakah kondisi lapangan ataupun data sesuai dengan yang ada di proposal. Kemudian jika keadaan di lapangan sesuai dengan yang ada di proposal kemudian data tersebut diproses kelanjutannya sampai ke proses pencairan dana.

Dalam setiap program memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ketika tujuan itu tercapai, artinya perencanaan program berjalan dengan baik. Namun dalam penyelenggaraan program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini dari segi perencanaan sudah dapat dikatakan baik, berbeda dengan aktualisasi dari perencanaan itu sendiri yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat banyak kasus masyarakat yang ternyata tidak memiliki surat atau akta tanah padahal di awal persyaratan sudah disebutkan bahwa bantuan hanya akan diberikan kepada mereka yang menempati tanah milik sendiri dan tanah tersebut bukan merupakan tanah sengketa. Tepatnya di Kelurahan Kasunyatan ditemukan bahwa masih banyak warga masyarakatnya yang ternyata menempati daerah bendungan, yang merupakan tanah milik negara akibatnya mereka tidak dapat diproses menjadi calon penerima bantuan. Ketika bertanya apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang menempati tanah milik negara tersebut beberapa aparaturnya mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk saat ini, karena jika ingin dibantu tidak bisa, diusirpun juga tidak bisa karena mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Serang yang artinya adalah warga yang harus disejahterakan.

Dalam proses perencanaan pada program RS-RTLH ini terdapat pihak-pihak yang dilibatkan baik itu dari internal Dinas Sosial itu sendiri maupun dari pihak luar. Yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program RS-RTLH ini adalah tim verifikasi yang terdiri dari internal Dinas Sosial itu sendiri. Ada juga dari eksternalnya yang terlibat seperti BAPPEDA, Kecamatan, dan juga Kelurahan. Untuk mencapai tujuannya Dinas Sosial Kota Serang beserta pihak-pihak lain yang terlibat dalam program RS-RTLH ini melakukan tindakan-tindakan yang dinilai mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Seperti yang sudah I_{1.2} jelaskan tindakan yang dilakukannya yaitu dengan merangsang semangat gotong royong masyarakat untuk setidaknya membantu

dalam proses perehaban rumah sehingga dapat menghemat ongkos atau biaya untuk para tukangya yang bekerja dalam merehab rumah. Selain dari itu, seperti yang telah utarakan I_{1.1} Dinas Sosial Kota Serang memberikan juga program lain seperti KUBE untuk membantu dalam hal ekonomi. Dengan sudah layaknya rumah yang ditempati tentunya masyarakat tersebut tidak memikirkan lagi untuk masalah membangun rumah, dan lebih fokus ke usahanya.

Namun faktanya di lapangan apa yang menjadi tujuan dari program ini ternyata belum dapat direalisasikan secara maksimal. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa program ini hanya merupakan program stimulan untuk merangsang kepekaan masyarakat terhadap sesamanya. Ditemukan bahwa masyarakat sekitar tidak cukup terangsang untuk melakukan gotong royong untuk membantu proses perehaban rumah. Walaupun ada gotong royong itupun hanya dilakukan pada hari pertama dan keduanya saja, lalu kemudian selebihnya perehaban dilakukan oleh para tukang yang dipekerjakan oleh pemilik rumah si penerima bantuan. Ketika ada yang membantu pun biasanya hanya karena mereka memiliki hubungan saudara atau kekerabatan dekat dengan si penerima bantuan. Dengan budaya “tidak enakkan” yang tercipta di kalangan masyarakat, mereka merasa berkewajiban untuk setidaknya menyediakan makanan atau camilan kepada orang yang ikut membantu proses perehaban, walupun orang itu merupakan saudaranya sendiri. Sehingga hal itupun kemudian menjadi beban karena harus mengeluarkan biaya lebih dalam proses perehaban karena uang bantuan yang diberikan tidak boleh digunakan untuk ongkos tukang, melainkan murni hanya untuk belanja material.

Karena perspektif yang berbeda tentang penggunaan anggaran versi Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan, maka kemudian ditemukan beberapa temuan diantaranya, perbedaan persepsi, ternyata bukannya menyelesaikan masalah justru malah membuat masalah baru antara lain : pemilik rumah memiliki hutang di kemudian hari dikarenakan minimnya jumlah bantuan yang diberikan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Di dalam manajemen juga terdapat adanya pengorganisasian yang dimana pengorganisasian ini merupakan menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengorganisasian ini sangat berkaitan erat dengan perencanaan, karena dengan adanya organisasi inilah perencanaan tersebut bisa berjalan dan bisa mencapai tujuannya sesuai dengan keinginan. Dalam program RS-RTLH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang ini pengorganisasian atau pengelompokan pegawai dilakukan dengan cara membaginya ke beberapa kelompok kerja diantaranya ada tim verifikasi yang berasal dari pihak Dinas Sosial yang dibantu masyarakat sekitar penerima bantuan. Tim verifikasi bekerja selain untuk membuktikan bahwa orang yang mengajukan permohonan bantuan layak dibantu, mereka juga bertuga memverifikasi pada saat proses perehaban berjalan, mulai dari tahap 0%, 50%, sampai pada tahap akhir yaaitu 100%.

Tetapi setelah berbicara dengan masyarakat secara langsung diketahui bahwa banyak dari mereka yang bahkan tidak mengetahui atau mengenal orang-orang dari Dinas Sosial, yang mereka tahu hanya ada orang dinas yang datang,

bertanya-tanya lalu mengambil gambar pada saat proses perehaban rumah dilakukan. Masyarakat justru lebih mengenal dekat dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). dan pendamping yang diutus oleh pihak Kecamatan.

Di sisi lain juga ditemukan bahwa peran pihak RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tidak banyak dalam program ini. Dapat disimpulkan bahwa mereka hanya sekedar mengetahui jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya, serta secara simbolis mengetahui bahwa warganya memperoleh bantuan dari pemerintah. Pihak Kelurahan Kasunyatan sendiri membenarkan bahwa mereka tidak terlalu mencampuri, karena itu merupakan ranahnya Dinas Sosial beserta TKSK dan pendamping. Bahkan berdasarkan keterangan yang didapatkan dari para penerima bantuan banyak dari mereka yang mengajukan sendiri tanpa bantuan RT/RW, yang kemudian RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan hanya sekedar tanda tangan saja. Kemudian ketika dimintai data tentang jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di masing-masing Kelurahan secara konkret, baik pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak dapat memberikannya, dengan dalih bahwa berkas pada tahun tersebut tidak dibuat salinannya sehingga hanya Dinas Sosial yang memilikinya.

Selain dari internal Dinas Sosial ada juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepengurusan program ini seperti dari BAPPEDA yang berfungsi sebagai koordinator bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan program. Di sisi lain BAPPEDA juga menyediakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menyediakan data dalam proses pembangunan.

3. *Staffing* (Penyusunan Pegawai)

Penyusunan pegawai juga sangat berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam pengelolaan program RS-RTLH ini. Penyusunan pegawai menjelaskan mengenai keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. Dalam penyusunan pegawai ini, memiliki indikator yaitu penempatan pegawai sesuai dengan ahlinya yang artinya melengkapkan fungsi pekerjaan dengan pegawai yang mempunyai ahli di bidangnya.

Seperti yang sudah dipaparkan oleh I_{1.1} dan I_{1.2} penempatan pegawai dalam program RS-RTLH ini telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena telah mendapat pembinaan sebelumnya. SDM yang dimiliki Dinas Sosial juga terbilang mumpuni karena sudah mengetahui IT dan juga memiliki tanggung jawab penuh dalam setiap pekerjaannya. Dari bidang Penanganan Fakir Miskin ini memiliki 3 orang Kepala Seksi, dari lulusan S2 ada 2 orang dan S1 ada 1 orang, serta dibantu oleh staf dan tenaga magang yang kesemuanya adalah S1. Bisa dikatakan SDM yang ada telah mempunyai pendidikan yang mumpuni, dan mengerti pada tupoksinya masing-masing. Sedangkan jumlah pegawai yang ada di dalam program RS-RTLH ini sudah memadai dan sudah cukup. Dalam kepengurusan ini juga melibatkan Kasi yang khusus menangani program ini di bantu oleh tim verifikasi yang terdiri atas pegawai internal Dinas Sosial dan juga dari masyarakat. Selain itu juga ada pendamping dan TKSK dari pihak kecamatan.

Namun fakta di lapangannya peneliti menemukan hal yang unik, yang mana Kepala Seksi yang seharusnya menangani program RS-RTLH ini malah tidak

mengetahui sama sekali tentang program ini, sehingga tugasnya itu dilimpahkan kepada Kepala Seksi lain yang terpaksa mendapat tugas tambahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai tersebut hanya secara simbolis menjadi Kepala Seksi atau Kepala Seksi Bayangan.

4. *Directing* (Pembinaan Kerja)

Dimensi manajemen selanjutnya yaitu pembinaan kerja yang masih berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian dan juga dengan penempatan pegawai. Pembinaan kerja yaitu tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi.

Pembinaan kerja dinilai menjadi aspek yang sangat penting dalam terwujudnya tujuan dari program karena agar tugas yang dikerjakan oleh seluruh pegawai yang berada di Bidang Penanganan Fakir Miskin ini dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan uraian tugasnya, pembinaan yang diberikan juga harus pembinaan yang menjurus ke arah program sehingga pegawai yang terlibat di dalam program tersebut paham dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya. Mengingat pembinaan itu sangat penting maka Dinas Sosial Kota Serang melakukan pembinaan kerja dalam proses pelaksanaan program RS-RTLH ini. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman antar pegawai dan juga agar dalam pengerjaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Pembinaan tersebut dilakukan Pembinaan itu sendiri diberikan kepada para pegawai internal Dinas Sosial dan juga para pendamping-pendamping dari kecamatan hal ini dilakukan untuk menselaraskan dalam pengerjaan program RS-RTLH ini. Pembinaan itu

sendiri tidak hanya diberikan kepada para pekerjanya saja melainkan diberikan juga kepada penerima bantuan yang berupa bimtek, pengarahan, sosialisasi dan lainnya.

Berdasarkan yang diperoleh dari keterangan para penerima bantuan, memang ada pemberian arahan dan bimbingan teknis dari Dinas Sosial, tetapi pada dasarnya mereka tetap tidak dapat memahami dengan baik bahkan setelah bimbingan diberikan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan para penerima bantuan yang masih terbilang rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan teknis yang diberikan kepada para penerima bantuan kurang maksimal, karena pada akhirnya mereka mengandalkan pendamping dan TKSK yang mengurus mereka.

5. *Coordinating (Pengkoordinasian)*

Selanjutnya dalam manajemen ini terdapat pengkoordinasian yang dimana memiliki arti kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan daripada pekerjaan. Selain itu, koordinasi juga merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi juga merupakan komponen yang sangat penting bagi Dinas Sosial dalam program RS-RTLH ini, baik itu kordinasi antar lembaga dan kordinasi antar bagian atau bidang. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Serang melakukan koordinasi dengan pihak BAPPEDA, pihak kecamatan yang diwakili oleh pendamping di setiap kecamatan, selain itu juga ada TKSK, pihak kelurahan,

RT/RW setempat, dan juga OPD lain yang terkait dengan program RS-RTLH ini. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat-rapat, bimbingan teknis mengenai program RS-RTLH ini dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait seperti Camat, Lurah, Lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Serang dan dengan masyarakat itu sendiri. Semua hal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan di awal perencanaan.

6. Reporting (Pelaporan)

Dalam fungsi manajemen dimensi pelaporan berkaitan dengan pengkoordinasian. *Reporting* merupakan manajemen yang berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Bentuk laporan yang ada di program RS-RTLH ini, peneliti membaginya ke dua bagian yang pertama laporan hasil perhaban yang dilakukan oleh penerima bantuan kepada pihak Dinas Sosial Kota Serang khususnya pada Bidang Penanganan Fakir Miskin yang dalam hal ini sebagai penyelenggara program. Kedua adalah laporan antar lembaga, misalkan Dinas Sosial Kota Serang melakukan laporan kepada lembaga yang lebih tinggi. Untuk Laporan yang dilakukan oleh penerima bantuan kepada Dinas Sosial itu saat awal dari 0%, 50%, dan 100%. Kemudian ketika pengerjaan perhaban rumah telah selesai barulah

dibuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) oleh masyarakat yang dibantu oleh pendamping maupun TKSK agar laporan yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Sedangkan laporan antar lembaga yang dilakukan Dinas Sosial itu berupa monitoring evaluasi untuk di internal Dinas Sosial itu sendiri. Selain itu Dinas Sosial juga membuat SPJ sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana-dana yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial selaku penyelenggara program. Di BAPPEDA menyediakan Sistem informasi (SIPD) untuk instansi-instansi yang akan memberikan laporannya. Sedangkan pihak kecamatan Kasemen hanya melaporkan tentang bagaimana kondisi dan juga jumlah rumah yang tidak layak huni di kecamatan Kasemen kepada Dinas Sosial Kota Serang.

7. Budgeting (Penganggaran)

Selanjutnya yang terakhir dalam fungsi manajemen yaitu adanya penganggaran. Penganggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam penganggaran terdapat rencana anggaran yang berarti suatu anggaran atau dana harus disesuaikan dengan kegiatan. Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dilakukan dari tahun sebelumnya. Setelah itu pihak Dinas Sosial Kota Kota Serang mengajukannya ke pemerintahan pusat untuk menunggu persetujuan. Setelah mendapat persetujuan baru kemudian anggarannya pun dicairkan.

Untuk mekanisme perencanaan anggaran itu sendiri yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dimulai dari kepala seksi yang menyusun rencana

kegiatan anggaran (RKA). Kepala seksi ini membuat perhitungan terhadap anggaran yang nantinya akan diberikan kepada penerima bantuan dengan melihat kondisi harga bahan bangunan yang ada di pasaran. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah maupun dari BAPPEDA. Setelah itu jadilah sebuah dokumen anggaran yang nantinya harus dipakai..

Menurut pernyataan dari para penerima bantuan program RS-RTLH ini, anggaran untuk biaya perehaban masih belum mencukupi sehingga para penerima menggunakan uang sendiri untuk menutupi kekurangannya. Untuk menutupi kekurangannya penerima bantuan inipun meminta sumbangan materi dari sanak saudaranya bahkan sampai meminjam uang kesana kemari untuk menutupi kekurangannya sehingga meninggalkan banyak hutang pasca proses perehaban.

Sedangkan pihak Dinas Sosial Kota Serang menyatakan bahwa jumlah anggaran yang diberikan pihak Dinas Sosial kepada penerima bantuan itu telah dihitung dengan melihat pada kekuatan dari APBD Kota Serang itu sendiri, dan juga melihat pada petunjuk teknis yang ada di program Kementerian Sosial. Anggaran yang diberikan juga merupakan hasil dari perhitungan dengan menyesuaikan harga barang pada tahun tersebut.

Dalam penganggaran ini juga terdapat indikator mengenai pengawasan anggaran yang merupakan lembaga atau bidang yang mengawasi pengeluaran yang dilakukan oleh penerima dalam kegiatan yang sedang berjalan, pengawasan anggaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial kepada penerima bantuan dimulai dari awal pencairan dana, kemudian pada proses perehaban rumahnya, sampai ke penggunaan anggaran yang dilakukan oleh para penerima bantuan.

Pengawasan anggaran ini juga dilakukan oleh antar lembaga yang bersangkutan, agar dana yang telah dicairkan kepada pihak penyelenggara (Dinas Sosial Kota Serang) dapat tersalurkan dengan baik dan tidak menyimpang. Pengawasan yang dilakukan lembaga terkait anggaran yang adapun dilakukan oleh pihak Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota Serang. Sedangkan di sini Dinas Sosial hanya menjadi pelaksana anggaran tersebut untuk sampai kepada para penerima bantuan.

Berdasarkan apa yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan Dinas Sosial Kota Serang hanya dengan cara membaca Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di akhir kegiatan yang peneliti rasa terbilang belum cukup, padahal bisa dilakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait proses pembelanjaan yang dilakukan si penerima. Pemerintah (Dinas Sosial) seharusnya tidak serta merta langsung mempercayai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah dibuat saja, tetapi juga harus dilakukan *spot check* untuk mencocokkan dan mengkonfirmasi kepada masyarakat dan pihak ketiga. Maka dengan demikian dapat dikatakan belum menjalankan mekanisme tupoksinya dengan baik. Kendala tidak dapat dilakukannya hal tersebut dikarenakan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Kepala Seksi yang seharusnya menangani bidang ini justru tidak melaksanakan tugasnya sehingga dilimpahkan kepada Kepala Seksi yang lain, sehingga tugas si Kepala Seksi pengganti menjadi dua kali lipat, di sisi lain walaupun berdasarkan keterangan dari para *key informan* yang mengatakan bahwa sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup, tidak dengan kenyataannya di lapangan yang terlihat bahwa memang kekurangan sumberdaya manusia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan program yang menjadi unggulan dan primadona dari Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini dikarenakan program RS-RTLH ini merupakan program yang sifatnya fisik dan berbentuk serta hasilnya nyata. Program RS-RTLH ini sendiri dilatar belakangi oleh kemiskinan dan lingkungan kumuh yang ada di Kota Serang. Program RS-RTLH ini dalam pelaksanaannya bisa dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada proses manajemen programnya. Hal ini bisa dilihat dari peran pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW serta Tokoh Masyarakat terbilang tidak aktif sehingga membebani TKSK, Dinas Sosial, serta warga itu sendiri dalam proses pengerjaan perhaban. Adapun masalah lain seperti kepala seksi yang harusnya menangani program RS-RTLH ini justru tidak mengetahui sama sekali tentang program ini yang berakibat melalaikan tugasnya, sehingga tugasnya itu diserahkan kepada kepala seksi lain. Pembinaan yang diberikan kepada para pegawai serta kepada masyarakat penerima dapat dikatakan belum efektif. Selain itu anggaran yang didapatkan penerimapun dirasa belum mencukupi untuk proses pembangunan rumah sehingga untuk menutupinya masyarakat sampai harus meminjam dana ke pihak lain sehingga dari program ini mengakibatkan hutang di kemudian hari bagi masyarakat penerima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang menjadi rekomendasi peneliti sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada dasarnya sudah bagus, tetapi faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang ternyata tidak memiliki surat tanah dan juga apa yang menjadi tujuan dari program ini yaitu sebagai stimulan semangat gotong royong dan kepekaan sosial masyarakat belum tercapai. Dalam hal ini rekomendasi penelitian yang diberikan adalah Dinas Sosial melalui pendamping dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) perlu menegaskan kembali bahwa hanya rumah yang memiliki surat tanah saja yang dapat dibantu perhabannya serta bagi mereka yang tinggal di tanah milik negara, sejauh ini belum ada kebijakan relokasi atau lainnya sehingga pemerintah belum dapat melakukan tindakan apapun. Di sisi lain, diperlukan penekanan bahwa tujuan dari program ini pada dasarnya adalah meningkatkan semangat gotong royong di kalangan masyarakat.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Renovasi adalah pembaharuan, peremajaan; penyempurnaan, sedangkan Rehabilitasi adalah pemulihan atau perbaikan kepada keadaan yang dahulu (semula). Jadi, “renovasi” adalah perbaikan rumah yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas, sedangkan “rehabilitasi” adalah perbaikan rumah yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan

sesuai dengan kondisi semula. Berangkat dari definisi kedua istilah itu, haruslah dapat dibedakan oleh masyarakat. Masyarakat harus mengubah pola pikir bahwa program ini bukanlah “renovasi” melainkan untuk “rehabilitasi”.

3. Rekomendasi penelitian yang selanjutnya adalah sebaiknya Dinas Sosial mengkaji ulang tentang bagaimana cara penyampaian bimbingan teknis dan pengarahan-pengarahan yang diberikan agar dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik sehingga masing-masing pihak yang terlibat memahami peran dan fungsinya agar tidak hanya memberatkan satu pihak saja. Dengan cara pematangan konsep, tujuan, dan tata cara penyampaian bimbingan teknis yang akan dilakukan, serta mengintensifkan dan mengoptimalkan sosialisasi. Dibutuhkan peran aktif dari Tokoh Masyarakat, RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan untuk dapat membantu mengarahkan serta memberikan pemahaman dasar tentang program ini, bukan program renovasi rumah, tetapi program rehabilitasi rumah dengan mengukur skala prioritas serta mengandalkan gotong royong dan kepekaan lingkungan sosial, maka dari itu kesadaran moral dari masyarakat sekitar penerima bantuan agar mau membantu prosesnya.
4. Rekomendasi selanjutnya adalah Pemerintah (Dinas Sosial) sebaiknya tidak serta merta langsung mempercayai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah dibuat saja, alangkah baiknya jika dilakukan *spot check* untuk mencocokkan dan mengonfirmasi kepada masyarakat atau pihak ketiga yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Pers
- Handayani, Suwarno. 2001. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Mas Agung
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BFEE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan, Prasetya. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosa Karya
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Bumi Aksara
- Terry, George dan Lesile W. Rue. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Sumber lainnya:

- Adi Fajar Nugraha, 2014. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa FISIP. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.

Edyta Widi Nugraheni, 2013. Skripsi Universitas Sebelas Maret. FISIP. Manajemen Bantuan Rumah Tangga Miskin Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Oleh Bapermas, Perempuan, KB, dan Ketahanan Pangan Di Kota Salatiga.

Nadia Dewinta dan H. Muhammad Ridwan, 2011. Jurnal. Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

BPS. <https://www.bps.go.id/brs/view/1229>, 19 November 2017.

BPS. 2017. Banten Dalam Angka 2017.